



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

BAB I Pendahuluan

1.1. Informasi Umum

Pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan manifestasi tanggungjawab pemerintah terkait pelaksanaan urusan wajib bidang sosial dalam penyediaan pelayanan kebutuhan dasar bagi masyarakat terutama Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS).

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang berdasarkan kepada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat dan telah diubah dengan Perda Nomor 2 tahun 2021, adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang sosial yang meliputi pelaksanaa tugas urusan pemerintah dibidang sosial.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat melaksanakan program-program pembangunan kesejahteraan sosial yang merupakan program dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu “ **Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan**”.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat mempunyai Misi sebagaimana yang telah ditetapkan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada point 1 “**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing**”.

Adapun Tujuan, Saran, Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

A. Tujuan

Tujuan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang ingin dicapai Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 - 2026, adalah:



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

1. Meningkatnya Kemandirian Pelayanan Kesehatan Sosial (PPKS)
2. Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani

B. Sasaran

Sasaran pembangunan kesejahteraan sosial Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat selama masa periode RPJMD tahap kedua (2021-2026), adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kemandirian Pelayanan Kesehatan Sosial (PPKS)
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi

C. Strategi

1. Meningkatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial
2. Meningkatkan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial
3. Meningkatkan Partisipasi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
4. Meningkatkan tata kelola organisasi yang baik
5. Meningkatkan Integritas dan Kompetensi ASN
6. Meningkatkan PSKS yang telah disertifikasi dan diakreditasi
7. Meningkatkan pelayanan Internal Organisasi dibidang layanan umum, layanan aset, dan layanan kepegawaian

D. Kebijakan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, pembangunan bidang kesejahteraan sosial diarahkan kepada :



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

1. Rehabilitasi sosial, dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
2. Perlindungan dan Jaminan sosial, adalah Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang diarahkan untuk mewujudkan warga masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan tidak berdaya agar mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Sasarannya untuk :
 - a. Pengelolaan Data Fakir Miskin
 - b. Pengangkatan Anak antar WNI.
3. Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk memberdayakan:
 - a. Pekerja Sosial Masyarakat
 - b. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
 - c. Kelembagaan Masyarakat
 - d. Keluarga

Memperhatikan hal tersebut di atas maka kebijakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial tahun 2021 – 2026 diarahkan untuk :

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar didalam panti.
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar dalam panti.
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar didalam panti.
4. Rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis didalam panti.



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

5. Peningkatan kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin, kelompok rentan dan PPKS lainnya.
6. Peningkatan kualitas layanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang akurat dan tepat waktu dan menciptakan sistem informasi layanan DTKS yang handal.
7. Peningkatan kemandirian masyarakat Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan kesiapsiagaan bencana melalui perlindungan sosial adiktif.
8. Peningkatan kapasitas SDM Kessos, peran dunia usaha dalam pengumpulan dan pengelolaan sumbangan sosial, kelembagaan sosial yang modern dan peningkatan nilai-nilai Kesetiakawanan Sosial Nasional dan Kepahlawananan di tengah masyarakat.
9. Meningkatkan kinerja ASN.
10. Mengirim ASN untuk mengikuti diklat.
11. Meningkatkan pendidikan formal ASN.
12. Melakukan aksi-aksi bagi perbaikan kualitas pelayanan Organisasi

1.2 Maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.

Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara) membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif.



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD TA 2024. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Operasional (LO)
3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
4. Neraca
5. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan disusun bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan,
- Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran,
- menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

- menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya.
- menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan.

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk penerapannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah. Selanjutnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK-05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah maka disusunlah Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu:

- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.
- Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

Dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan penjabaran realisasi APBD TA 2024, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, guna mengurangi perbedaan struktur akun pendapatan dan belanja pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006. maka dalam proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dilakukan langkah pemetaan atau konversi. Konversi dilakukan dengan cara menelusuri kembali (*trace back*) pos-pos Laporan keuangan menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dengan pos-pos Laporan Keuangan menurut SAP.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan tahun 2024 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979.
- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 .
- PP no.12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

- Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.

- Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Hibah;
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Penjabaran APBD Tahun 2024;
- Peraturan Gubernur Nomor 82 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat .

1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas , Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta informasi lainnya yang diperlukan.

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan TA 2024 meliputi hal-hal berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Informasi Umum
- 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 1.1. Ekonomi Makro



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

- 1.2. Kebijakan Keuangan
- 1.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yangtelah ditetapkan

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuanyang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.1. Pendapatan LRA
 - 5.1.2. Belanja
- 5.2. Penjelasan Neraca
 - 5.2.1. Aset
 - 5.2.2. Kewajiban
 - 5.2.3. Ekuitas Dana
- 5.3. Penjelasan Laporan Operasional (LO)
 - 5.3.1. Pendapatan LO
 - 5.3.2. Belanja LO



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

- 5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII. PENUTUP



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN

2.1 Ekonomi Makro

Tujuan Pembangunan bidang kesejahteraan sosial sebagaimana yang telah ditetapkan setiap tahunnya, antara lain meningkatkan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial dan kepedulian serta partisipasi sosial masyarakat dalam pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan sosial.

Sesuai tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial, dimana sasaran program Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kemandirian Pelayanan Kesehatan Sosial (PPKS)
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi

Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota, maka Pembangunan Kesejahteraan Sosial diarahkan kepada Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Jaminan Sosial.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dalam mengelola APBD tahun anggaran 2024 meliputi hal berikut :

2.2.1. Kebijakan Peningkatan Pendapatan

Kebijakan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat salah satu Dinas yang tidak mempunyai pendapatan sesuai



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

peraturan yang ditetapkan. Disamping hal tersebut juga tidak mempunyai pendapatan yang lain-lain yang dianggap sah.

2.2.2. Kebijakan Umum pada Aspek Belanja Daerah

Kebijakan di bidang pengeluaran yang dilaksanakan dengan meningkatkan prioritas dan rasionalitas belanja baik belanja operasi maupun belanja modal melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan.

Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran dalam upaya optimalisasi sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.
- Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada Program dan Kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat.
- Meningkatnya perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja Program dan Kegiatan.

2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Adapun sasaran yang akan dicapai dari peningkatan pelayanan dibidang kesejahteraan sosial dalam tahun 2024 adalah :

1. Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial.
2. Meningkatkan Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial.
3. Meningkatkan Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi.
5. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi.



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat melaksanakan beberapa program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dimana dalam tahun anggaran 2024 terdapat perubahan di beberapa program/kegiatan/Sub Kegiatan yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), dengan capaian target kinerja sebagai berikut :

No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Target Kinerja
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi terdiri dari :	
A	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran serta evaluasi perangkat daerah Dinas Sosial selama 12 bulan.
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya koordinasi dalam penyusunan laporan kinerja Dinas Sosial yang terdiri dari laporan tahunan APBD, laporan tahunan APBN, LAKIP, LKPJ dan LPPD secara tertib dan lancar.
3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN Dinas Sosial dan UPTD selama 12 bulan.
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya jasa administrasi keuangan yang terdiri dari pengelola keuangan, pengelola barang milik daerah, pengelola system informasi, petugas PPHPK Dinas Sosial dan



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

		UPTD.
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sebanyak 14 Dokumen selama 12 bulan.
C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
1.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya jasa administrasi keuangan pengamanan Barang Milik Daerah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
2.	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan laporan Barang Milik Daerah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sebanyak 8 laporan selama 12 bulan
D	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas Pegawai dan meningkatnya kesejahteraan Pegawai 6 UPTD pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
E	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan	Tersedianya kebutuhan instalasi listrik/penerangan untuk bangunan kantor



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

	Kantor	Dinas Sosial dan 8 UPTD selama 12 bulan.
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk Dinas Sosial dan 7 UPTD.
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor di Dinas Sosial dan 8 UPTD selama 12 bulan.
4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik Dinas Sosial dan 8 UPTD selama 12 bulan.
5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan yang menunjang operasional Dinas Sosial dan 8 UPTD selama 12 bulan
6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan di UPTD Pantii Sosial Karya Wanita (PSKW) Andam Dewi dan UPTD PSAABR Budi Utama selama 12 bulan.
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi Dinas Sosial dan 8 UPTD dengan instansi/lembaga terkait dan vertikal secara baik selama 12 bulan.
F	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya pengadaan kendaraan operasional kantor/lapangan (roda 4) sebanyak 1 unit untuk UPTD Pantii Sosial Karya Wanita (PSKW) Andam Dewi Provinsi Sumatera Barat.



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

2.	Pengadaan Mebel	Tersedianya pengadaan kursi dan meja kerja untuk Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dan 3 UPTD.
3.	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya untuk Dinas Sosial dan 4 UPTD.
4.	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan	Tersedianya Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Multi Layanan di UPTD Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Andam Dewi.
G	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya kelancaran administrasi Dinas Sosial dan 5 UPTD selama 12 bulan
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Dinas Sosial dan 8 UPTD selama 12 bulan
3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya jasa informasi dan publikasi Dinas Sosial dan UPTD Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Andam Dewi selama 12 bulan
4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya jasa kebersihan kantor, jasa pengaman kantor, jasa sopir kantor, honor PTT, jasa kesehatan jasmani dan rohani Dinas Sosial dan 8 UPTD selama 12 bulan
H	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional sebanyak 16 unit Dinas Sosial dan 8 UPTD selama 12 bulan.



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

	Operasional atau Lapangan	
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya Dinas Sosial dan 8 UPTD selama 12 bulan
4.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya rehab Gedung kantor pada Dinas dan 4 UPTD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
5.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan AC, Komputer, dan printer untuk Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
II	Program Pemberdayaan Sosial terdiri dari :	
A	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang.	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang di lingkungan Provinsi Sumatera Barat.
B	Pemberdayaan Pontensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	
1.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Potensi Pilar Sosial dengan Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi sejumlah 271 Keluarga
2.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat	Meningkatnya pengetahuan pengurus/pengelola forum Karang Taruna sebanyak 1 lembaga, LKKS sebanyak 19 lembaga, SLRT 19 lembaga, masyarakat yang



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

	Kewenangan Provinsi	ditingkatkan nilai-nilai kepahlawanannya sebanyak 100 orang, dan pemberian penghargaan bagi PSKS sebanyak 19 lembaga.
III	Program Rehabilitasi Sosial	
A	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti :	
1.	Penyediaan Permakanan	Terlaksananya pemberian bantuan permakanan untuk panti swasta disabilitas se-Sumbar sebanyak 300 orang. Dan tersedianya permakanan di 2 UPTD Dinas Sosial selama 12 bulan.
2.	Penyediaan Sandang	Tersedianya sandang di 2 UPTD Dinas Sosial dan 15 panti swasta dilingkungan Provinsi Sumatera Barat selama 12 bulan.
3.	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Tersedianya asrama yang mudah diakses sebanyak 80 Panti swasta dan 2 UPTD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
4.	Penyediaan Alat Bantu	Terlaksananya pemberian hibah uang untuk pengadaan alat bantu dan alat bantu peraga untuk panti penyandang disabilitas 1 UPTD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
5.	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam panti	Tersedianya persediaan perbekalan kesehatan (obat-obatan) untuk 1 Panti swasta dan 2 Uptd Dinas Sosial selama 12 bulan.
6.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Terujuknya penyandang disabilitas untuk mengikuti rehabilitasi di panti rujukan .
7.	Pemberian Bimbingan Aktivitas	Terlaksananya pemberian kegiatan aktivitas



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

	Hidup Sehari-Hari	kehidupan sehari-hari bagi penyandang disabilitas untuk 12 Panti swasta dan 2 UPTD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
8.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terlaksananya pelayanan penelusuran keluarga untuk 2 UPTD Dinas Sosial selama 12 bulan.
9.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terlaksananya pelayanan reunifikasi keluarga untuk 1 UPTD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
10.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Meningkatnya kapasitas PSKS panti penyandang disabilitas sebanyak 50 orang dan terlaksananya rujukan penyandang disabilitas ke Balai RSPD Kemensos sebanyak 9 orang.
B	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	
1.	Penyediaan Makanan	Terlaksananya pemberian bantuan permakanan untuk panti swasta anak se-Sumbar sebanyak 3116 orang. Dan tersedianya permakanan di 3 UPTD Dinas Sosial selama 12 bulan.
2.	Penyediaan Sandang	Terlaksananya penyediaan sandang untuk 185 orang dan 3 UPTD Dinas Sosial selama 12 bulan.
3.	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Tersedianya asrama yang mudah diakses sebanyak 2 Panti Swasta dan 3 UPTD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
4.	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam panti	Tersedianya persediaan perbekalan kesehatan (obat-obatan) untuk 3 UPTD Dinas Sosial



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

		selama 12 bulan.
5.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial Anak untuk 2 UPTD Dinas Sosial selama 12 bulan.
6.	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Terlaksananya pemberian bimbingan aktivitas sehari-hari untuk 16 Panti swasta dan 2 UPTD Dinas Sosial.
7.	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Tersedianya akses ke layanan pendidikan dan kesehatan untuk 2 UPTD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dan terlaksananya bantuan hibah uang akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar untuk 1300 di beberapa panti swasta dilingkungan Provinsi Sumatera Barat.
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar dalam Panti	Terlaksananya Bimbingan Teknis PSKS Panti Anak di Kabupaten Solok sebanyak 68 Orang
8.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Terlaksananya pelayanan penelusuran keluarga untuk 3 UPTD Dinas Sosial selama 12 bulan.
9.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terlaksananya pelayanan reunifikasi keluarga untuk 2 UPTD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
10.	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Pengganti	Terlaksananya Akses Layanan kepada Keluarga Pengganti Anak didalam Panti untuk 3 UPTD Dinas Sosial selama 12 bulan.
C	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

1.	Penyediaan Permakanan	Terlaksananya pemberian bantuan permakanan untuk panti swasta lanjut usia se-Sumbar sebanyak 40 orang. Dan tersedianya permakanan untuk 2 UPTD Dinas Sosial selama 12 bulan.
2.	Penyediaan Sandang	Terlaksananya pengadaan sandang untuk lanjut usia di 2 UPTD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat selama 12 bulan dan terlaksananya bantuan hibah uang penyediaan sandang untuk 20 orang di panti swasta.
3.	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Tersedianya asrama yang mudah diakses untuk 2 UPTD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
4.	Penyediaan Alat Bantu	Terlaksananya pemberian hibah uang untuk pengadaan alat bantu untuk panti lanjut usia sebanyak 1 Panti swasta dan 2 UPTD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
5.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Sosial	Terlaksananya perbekalan kesehatan (obat-obatan) untuk lanjut usia di 2 UPTD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat selama 12 bulan.
6.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Terlaksananya pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk lanjut usia di UPTD Panti Sosial Tresna Wherda (PSTW) Kasih Sayang Ibu Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat selama 1 tahun.
7.	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Terlaksananya bimbingan aktivitas hidup sehari-hari di 2 UPTD Dinas Sosial selama 12 bulan dan terlaksananya pemberian hibah uang



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

		penyediaan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari untuk 36 orang di 1 panti swasta.
8.	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Terlaksananya pelayanan penelusuran keluarga di UPTD Panti Sosial Tresna Wherda (PSTW) Kasih Sayang Ibu Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
9.	Pemulasaraan	Terlaksananya pemulasaraan di 2 UPTD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
10.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya kegiatan Lanjut Usia Berkreasi dan HLUN sebanyak 500 orang dan terlaksananya peningkatan kemampuan /kapasitas PPKS dalam penanganan Lanjut Usia Terlantar sebanyak 50 orang.
D.	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	
1.	Penyediaan Sandang	Terlaksananya penyediaan sandang untuk UPTD Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Andam Dewi Dinas Sosial selama 12 bulan.
2.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Terlaksananya perbekalan kesehatan (obat-obatan) untuk lanjut usia di UPTD Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Andam Dewi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat selama 12 bulan.
3.	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Terlaksananya bimbingan aktivitas hidup sehari-hari untuk UPTD Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Andam Dewi Dinas Sosial selama 12 bulan



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

4.	Penyediaan Permakanan	Tersedianya permakanan untuk UPTD Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Andam Dewi Dinas Sosial selama 12 bulan.
5.	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Tersedianya asrama yang mudah diakses untuk UPTD Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Andam Dewi Dinas Sosial selama 12 bulan.
6.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Tersedianya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial untuk UPTD Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Andam Dewi Dinas Sosial selama 12 bulan
7.	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Tersedianya Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar untuk UPTD Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Andam Dewi Dinas Sosial selama 12 bulan
IV	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
A	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	
1.	Pengangkatan Anak antar WNI	Terlaksananya izin perimbangan dan pengangkatan anak sebanyak 25 orang.
B	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	
1.	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Data Fakir Miskin yang valid pada 540 Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota
2.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Tercapainya Data Fakir Miskin yang valid pada 850 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

		Keluarga Kewenangan Provinsi
V	Program Penanganan Bencana	
A	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	
1.	Penyediaan Permakanan	Terlaksananya Pemberian Bantuan Terhadap Korban Bencana Alam dan Sosial berupa Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi untuk 75 Orang
2.	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Terlaksananya penyediaan paket pengungsian untuk korban bencana sebanyak 30 Unit.
3.	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Terlaksananya rujukan pelayanan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi sebanyak 90 Orang
4.	Pelayanan Dukungan Psikososial	Terlaksananya pemberian pelatihan psikososial kepada masyarakat didaerah rawan bencana sebanyak 90 orang dan 5 kabupaten/kota diwilayah Provinsi Sumatera Barat
5.	Penyediaan Sandang	Terlaksananya Pemberian Bantuan Terhadap Korban Bencana Alam dan Sosial berupa Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi sebanyak 75 Orang
VI	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	
A	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	
1.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Terlaksananya pemeliharaan TMP Sumatera Barat.



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.

Pada Tahun anggaran 2024 Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat mendapat alokasi dana sebesar **Rp. 114.247.707.631,-** yang direncanakan untuk membiayai:

- Belanja pegawai
- Belanja barang dan jasa
- Belanja Hibah
- Belanja modal

Capaian kinerja keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 dari total pagu sebesar **Rp. 114.247.707.631,-** terealisasi sampai akhir Desember 2024 sebesar **Rp. 109.885.949.925,-** atau sebesar **96.18%**.

3.2. Belanja Daerah

Dari total dana sebesar **Rp. 114.247.707.631,-** semuanya merupakan dana yang diperuntukkan untuk belanja daerah, yang terdiri dari :

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% Realisasi
I.	Belanja Operasi	Rp. 108.311.836.642,-	Rp. 104.113.036.060,-	96,12
1.	Belanja Pegawai	Rp. 22.422.232.641,-	Rp. 21.206.093.148,-	94,57
2.	Barang dan Jasa	Rp. 44.317.298.551,-	Rp. 42.410.079.462,-	95,69



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

3.	Belanja Hibah	Rp. 41.572.305.450,-	Rp. 40.496.863.450,-	97,41
4.	Belanja Bantuan Sosial	Rp. 0,-	Rp. 0,-	
II.	Belanja Modal	Rp. 5.935.870.989,-	Rp. 5.772.913.865,-	97,25
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 850.477.700,-	Rp. 836.825.164,-	98,39
2.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 5.085.393.289,-	Rp. 4.936.088.701,-	97,06

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal yang dapat diuraikan sbb :

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% Realisasi
I.	Belanja Pegawai	Rp. 22.422.232.641,-	Rp. 21.206.093.148,-	94,57
II.	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 44.317.298.551,-	Rp. 42.410.079.462,-	95,69
III.	Belanja Hibah	Rp. 41.572.305.450,-	Rp. 40.496.863.450,-	97,41
IV.	Belanja Bantuan Sosial	Rp. 0,-	Rp. 0,-	-
V.	Belanja Modal	Rp. 5.935.870.989,-	Rp. 5.772.913.865,-	97,25



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

Untuk lebih rincinya capaian target kinerja keuangan menurut program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL		114.247.707.631	109.885.949.925	96.18%
DINAS SOSIAL		82.298.765.280	78.485.107.134	95.37%
1.6.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	25.343.148.105	23.918.939.886	94.38%
1.06.01.1.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	276.036.100	243.351.280	88.16%
1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	114.605.500	98.997.900	86.38%
1.06.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60.284.700	57.053.400	94.64%
1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	101.145.900	87.299.980	86.31%
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.126.303.141	20.910.114.618	94.50%
1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.619.792.641	20.404.493.148	94.38%
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	322.708.600	321.868.600	99.74%
1.06.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	183.801.900	183.752.870	99.97%



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

	Triwulanan/Semesteran SKPD			
1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	124.048.100	80.739.600	65.09%
1.06.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	47.343.000	15.584.000	32.92%
1.06.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	42.790.000	36.140.000	84.46%
1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	33.915.100	29.015.600	85.55%
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	174.556.081	169.567.866	97.14%
1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	51.750.000	51.612.000	99.73%
1.06.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	122.806.081	117.955.866	96.05%
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	794.758.721	746.318.823	93.91%
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.758.000	20.758.000	87.37%
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.360.000	17.040.915	83.70%
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21.310.600	20.485.000	96.13%
1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	195.414.500	179.859.900	92.04%



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.594.100	16.301.100	87.67%
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	515.321.521	491.873.908	95.45%
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	58.856.720	58.650.000	99.65%
1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	19.080.000	19.050.000	99.84%
1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.776.720	39.600.000	99.56%
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.403.987.572	1.351.773.434	96.28%
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.210.000	2.565.000	79.91%
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	244.854.000	227.394.381	92.87%
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.500.000	2.000.000	10.81%
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.137.423.572	1.119.814.053	98.45%
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	384.601.670	358.424.265	93.19%
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	166.090.000	161.237.020	97.08%
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.550.000	37.600.000	80.77%



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	116.156.500	111.490.245	95.98%
1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.805.170	48.097.000	86.19%
1.6.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	11.533.306.058	10.788.079.279	93.54%
1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	414.583.843	401.599.700	96.87%
1.06.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	414.583.843	401.599.700	96.87%
1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	11.118.722.215	10.386.479.579	93.41%
1.06.02.1.02.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	2.568.511.000	2.326.697.980	90.59%
1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	8.550.211.215	8.059.781.599	94.26%
1.6.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	43.974.133.944	42.481.719.017	96.61%



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	6.625.938.500	6.291.856.475	94.96%
1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	2.994.564.000	2.737.480.275	91.41%
1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang	19.950.000	-	0.00%
1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	2.024.317.000	2.024.317.000	100.00%
1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	826.070.000	826.070.000	100.00%
1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	596.702.000	596.702.000	100.00%
1.06.04.1.01.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	164.335.500	107.287.200	65.29%
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	35.844.742.444	34.730.195.042	96.89%
1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan	28.331.936.250	27.390.667.467	96.68%
1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	419.957.000	417.464.000	99.41%
1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	1.647.143.900	1.645.413.900	99.89%
1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	270.215.000	269.991.000	99.92%
1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	4.158.112.000	4.124.912.000	99.20%
1.06.04.1.02.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak	1.017.378.294	881.746.675	86.67%



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

	Terlantar di dalam Panti			
1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	711.504.300	676.005.900	95.01%
1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan	408.661.600	400.661.600	98.04%
1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang	50.000.000	49.620.000	99.24%
1.06.04.1.03.0004	Penyediaan Alat Bantu	45.633.000	45.633.000	100.00%
1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	8.814.000	8.814.000	100.00%
1.06.04.1.03.0013	Koordinasi. Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	198.395.700	171.277.300	86.33%
1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	791.948.700	783.661.600	98.95%
1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan	151.618.600	151.106.600	99.66%
1.06.04.1.04.0002	Penyediaan Sandang	121.480.000	121.480.000	100.00%
1.06.04.1.04.0005	Pemberian Bimbingan Fisik. Mental. Spritual dan	461.834.000	461.834.000	100.00%
1.06.04.1.04.0011	Koordinasi. Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	57.016.100	49.241.000	86.36%
1.6.05	PROGRAM PERLINDUNGAN	554.855.000	522.170.910	94.11%



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

	DAN JAMINAN SOSIAL			
1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	62.812.800	59.064.500	94.03%
1.06.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI	62.812.800	59.064.500	94.03%
1.6.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	602.823.000	510.073.710	84.61%
1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	602.823.000	510.073.710	84.61%
1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	258.626.500	182.661.810	70.63%
1.06.06.1.01.0002	Penyediaan Sandang	121.661.425	120.695.900	99.21%
1.06.06.1.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	74.010.450	68.833.500	93.01%
1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	88.133.025	81.130.000	92.05%
1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	60.391.600	56.752.500	93.97%
1.6.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	290.499.173	264.124.332	90.92%
1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	290.499.173	264.124.332	90.92%
1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	290.499.173	264.124.332	90.92%
Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung		5.024.443.266	5.012.533.329	99.76%
1.6.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	831.876.291	827.324.688	99.45%



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

	DAERAH PROVINSI			
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60.720.000	60.720.000	100.00%
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60.720.000	60.720.000	100.00%
1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.167.600	3.287.600	78.88%
1.06.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4.167.600	3.287.600	78.88%
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	189.103.715	188.872.400	99.88%
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.487.200	12.486.300	99.99%
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	890.000	890.000	100.00%
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.710.400	6.710.400	100.00%
1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	125.859.437	125.708.000	99.88%
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.978.000	8.977.700	100.00%
1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.440.000	1.440.000	100.00%
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32.738.678	32.660.000	99.76%



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.556.600	20.556.600	100.00%
1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.556.600	20.556.600	100.00%
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	520.588.376	517.882.038	99.48%
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	500.000	100.00%
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	83.820.000	83.661.966	99.81%
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	436.268.376	433.720.072	99.42%
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.740.000	36.006.050	98.00%
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26.800.000	26.066.050	97.26%
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.940.000	9.940.000	100.00%
1.6.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	4.192.566.975	4.185.208.641	99.82%
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	4.192.566.975	4.185.208.641	99.82%
1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan	1.817.550.000	1.816.896.116	99.96%
1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	357.832.725	356.689.275	99.68%



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	115.404.000	115.404.000	100.00%
1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	10.675.600	10.675.600	100.00%
1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik. Mental. Spiritual dan	1.028.263.150	1.025.021.650	99.68%
1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	151.296.500	151.296.500	100.00%
1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	660.645.000	658.325.500	99.65%
1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	22.100.000	22.100.000	100.00%
1.06.04.1.02.0012	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	28.800.000	28.800.000	100.00%
Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang		3.697.168.970	3.653.387.955	98.82%
1.6.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.164.254.437	1.130.317.668	97.09%
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60.720.000	60.720.000	100.00%
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60.720.000	60.720.000	100.00%
1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.260.000	2.550.000	78.22%
1.06.01.1.03.0004	Pembinaan. Pengawasan. dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	3.260.000	2.550.000	78.22%



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.000.000	9.000.000	100.00%
1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	9.000.000	9.000.000	100.00%
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	414.173.257	405.892.375	98.00%
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.052.500	17.052.500	100.00%
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.551.600	78.516.700	99.96%
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	113.174.500	112.342.000	99.26%
1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	155.294.275	150.565.175	96.95%
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.840.382	16.876.000	94.59%
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32.260.000	30.540.000	94.67%
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	55.813.880	55.813.880	100.00%
1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	36.450.000	36.450.000	100.00%
1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.363.880	19.363.880	100.00%
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	581.329.300	558.180.613	96.02%
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi.	105.867.000	85.462.230	80.73%



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

	Sumber Daya Air dan Listrik			
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	475.462.300	472.718.383	99.42%
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	39.958.000	38.160.800	95.50%
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.250.000	14.452.800	88.94%
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.870.000	7.870.000	100.00%
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.838.000	15.838.000	100.00%
1.6.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.532.914.533	2.523.070.287	99.61%
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	2.532.914.533	2.523.070.287	99.61%
1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan	1.067.500.000	1.066.959.000	99.95%
1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	279.090.000	277.365.000	99.38%
1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	62.320.000	62.320.000	100.00%
1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	8.866.000	8.865.300	99.99%
1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik. Mental. Spiritual dan Sosial	728.798.533	723.666.336	99.30%
1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	25.145.000	24.394.651	97.02%



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	347.195.000	345.500.000	99.51%
1.06.04.1.02.0012	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti	14.000.000	14.000.000	100.00%
Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang		3.240.690.770	3.190.415.496	98.45%
1.6.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	832.235.906	785.090.614	94.34%
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60.720.000	60.720.000	100.00%
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60.720.000	60.720.000	100.00%
1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.520.000	1.520.000	100.00%
1.06.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1.520.000	1.520.000	100.00%
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.750.000	6.750.000	100.00%
1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	6.750.000	6.750.000	100.00%
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	137.858.539	136.119.780	98.74%
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.546.600	8.546.600	100.00%



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.981.780	9.981.780	100.00%
1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	87.744.706	87.015.900	99.17%
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.680.000	8.681.000	89.68%
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.905.453	21.894.500	99.95%
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	596.877.367	552.741.984	92.61%
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	157.657.200	116.015.129	73.59%
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	439.220.167	436.726.855	99.43%
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.510.000	27.238.850	95.54%
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19.750.000	18.478.850	93.56%
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.760.000	8.760.000	100.00%
1.6.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.408.454.864	2.405.324.882	99.87%
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	2.408.454.864	2.405.324.882	99.87%
1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan	1.281.000.000	1.280.853.390	99.99%
1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	331.808.900	328.902.400	99.12%



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	90.446.600	90.380.000	99.93%
1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	4.193.350	4.193.350	100.00%
1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	249.586.300	249.586.300	100.00%
1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	403.813.000	403.812.942	100.00%
1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	36.566.714	36.561.500	99.99%
1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	11.040.000	11.035.000	99.95%
Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Sabai Nan Aluih" Sicincin		4.002.711.171	3.948.125.881	98.64%
1.6.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.485.861.015	1.433.917.151	96.50%
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60.720.000	60.720.000	100.00%
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60.720.000	60.720.000	100.00%
1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.560.000	4.560.000	100.00%
1.06.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4.560.000	4.560.000	100.00%
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	244.209.380	244.209.380	100.00%



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.088.000	30.088.000	100.00%
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.411.180	2.411.180	100.00%
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	27.495.000	27.495.000	100.00%
1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	141.991.200	141.991.200	100.00%
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.864.000	5.864.000	100.00%
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36.360.000	36.360.000	100.00%
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.076.871.635	1.026.765.071	95.35%
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.193.192	14.193.192	100.00%
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	425.224.000	375.117.436	88.22%
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	637.454.443	637.454.443	100.00%
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.500.000	97.662.700	98.15%
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41.950.000	40.112.700	95.62%
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.550.000	7.550.000	100.00%



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	50.000.000	100.00%
1.6.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.516.850.156	2.514.208.730	99.90%
1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	2.516.850.156	2.514.208.730	99.90%
1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan	1.409.100.000	1.407.994.530	99.92%
1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang	348.907.656	347.671.700	99.65%
1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	177.269.500	177.269.500	100.00%
1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	123.613.000	123.613.000	100.00%
1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	440.460.000	440.160.000	99.93%
1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan	17.500.000	17.500.000	100.00%
Panti Sosial Tresna Werda (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar		2.538.140.212	2.486.641.482	97.97%
1.6.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.143.449.380	1.108.954.155	96.98%
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60.720.000	60.720.000	100.00%
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60.720.000	60.720.000	100.00%
1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	25.500.000	25.479.000	99.92%



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

1.06.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10.200.000	10.200.000	100.00%
1.06.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	15.300.000	15.279.000	99.86%
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.000.000	9.000.000	100.00%
1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	9.000.000	9.000.000	100.00%
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	218.022.942	216.771.470	99.43%
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.640.000	14.640.000	100.00%
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000	5.000.000	100.00%
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	52.169.245	51.006.620	97.77%
1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	111.624.430	111.575.800	99.96%
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.642.000	6.626.000	99.76%
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.947.267	27.923.050	99.91%
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36.431.700	36.410.000	99.94%
1.06.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar	1.650.000	1.650.000	100.00%
1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	2.292.700	2.290.000	99.88%



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.489.000	32.470.000	99.94%
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	531.806.393	501.490.035	94.30%
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	67.150.000	49.104.970	73.13%
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	464.656.393	452.385.065	97.36%
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	261.968.345	259.083.650	98.90%
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	46.418.145	45.080.050	97.12%
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.300.000	4.300.000	100.00%
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	211.250.200	209.703.600	99.27%
1.6.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.394.690.832	1.377.687.327	98.78%
1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1.394.690.832	1.377.687.327	98.78%
1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan	896.700.000	896.661.327	100.00%
1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang	183.543.820	182.370.000	99.36%
1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	42.500.000	42.500.000	100.00%
1.06.04.1.03.0004	Penyediaan Alat Bantu	3.646.250	3.400.000	93.25%



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	16.062.710	16.053.000	99.94%
1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik. Mental. Spritual dan Sosial	155.535.000	155.040.000	99.68%
1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	44.290.000	44.250.000	99.91%
1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	28.413.052	28.413.000	100.00%
1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan	24.000.000	9.000.000	37.50%
Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang		3.074.917.071	3.002.798.498	97.65%
1.6.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	950.243.159	901.485.704	94.87%
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60.720.000	60.720.000	100.00%
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60.720.000	60.720.000	100.00%
1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.474.000	2.754.000	79.27%
1.06.01.1.03.0004	Pembinaan. Pengawasan. dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	3.474.000	2.754.000	79.27%
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.250.000	8.250.000	100.00%
1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	8.250.000	8.250.000	100.00%



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	236.499.938	219.535.196	92.83%
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.503.800	10.503.800	100.00%
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.275.000	38.592.656	98.26%
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.108.500	16.379.125	67.94%
1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	147.549.938	139.253.665	94.38%
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.702.000	4.702.000	100.00%
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.360.700	10.103.950	97.52%
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	581.583.721	553.883.898	95.24%
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.785.710	1.784.250	99.92%
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	86.767.375	62.017.420	71.48%
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	493.030.636	490.082.228	99.40%
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.715.500	56.342.610	94.35%
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.235.500	31.309.710	97.13%



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.480.000	25.032.900	91.09%
1.6.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.124.673.912	2.101.312.794	98.90%
1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	2.124.673.912	2.101.312.794	98.90%
1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	1.281.000.000	1.279.030.200	99.85%
1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang	146.100.640	138.001.000	94.46%
1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	85.893.000	84.638.600	98.54%
1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	14.782.780	13.636.580	92.25%
1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	582.147.492	571.476.564	98.17%
1.06.04.1.01.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	10.098.125	9.885.700	97.90%
1.06.04.1.01.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	4.651.875	4.644.150	99.83%
Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang		2.269.169.538	2.238.629.836	98.65%
1.6.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	799.761.591	777.717.776	97.24%
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	52.560.000	52.560.000	100.00%
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	52.560.000	52.560.000	100.00%



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.500.000	13.500.000	100.00%
1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	13.500.000	13.500.000	100.00%
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	108.919.500	107.345.500	98.55%
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.543.000	8.540.500	99.97%
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.986.300	2.980.300	99.80%
1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72.246.700	70.778.700	97.97%
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.620.000	5.620.000	100.00%
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.523.500	19.426.000	99.50%
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	550.000	550.000	100.00%
1.06.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar	550.000	550.000	100.00%
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	581.082.091	565.874.526	97.38%
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	1.200.000	100.00%
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.033.500	60.887.845	86.94%
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan	509.848.591	503.786.681	98.81%



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

	Umum Kantor			
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.150.000	37.887.750	87.80%
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.750.000	27.487.750	83.93%
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.400.000	10.400.000	100.00%
1.6.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.469.407.947	1.460.912.060	99.42%
1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	1.469.407.947	1.460.912.060	99.42%
1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	640.500.000	639.473.700	99.84%
1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang	159.980.250	158.350.000	98.98%
1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	48.699.900	48.687.700	99.97%
1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu	11.550.000	11.550.000	100.00%
1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	3.178.700	3.174.850	99.88%
1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	574.799.097	569.431.610	99.07%
1.06.04.1.01.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	30.700.000	30.244.200	98.52%
	Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok	8.101.701.353	7.868.310.314	97.12%



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

1.6.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.383.343.653	6.159.336.684	96.49%
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	69.000.000	69.000.000	100.00%
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	69.000.000	69.000.000	100.00%
1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.090.000	9.084.000	99.93%
1.06.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	9.090.000	9.084.000	99.93%
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.750.000	15.750.000	100.00%
1.06.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	15.750.000	15.750.000	100.00%
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	393.992.142	386.110.833	98.00%
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	46.215.000	46.215.000	100.00%
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62.763.000	62.763.000	100.00%
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	72.729.005	72.728.550	100.00%
1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	71.795.800	71.795.800	100.00%



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.962.000	20.962.000	100.00%
1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.500.000	1.415.000	94.33%
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	118.027.337	110.231.483	93.39%
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.147.746.755	4.953.117.308	96.22%
1.06.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau	36.686.600	35.899.500	97.85%
1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	115.078.500	113.719.500	98.82%
1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63.595.000	63.595.000	100.00%
1.06.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.914.150.955	4.721.667.608	96.08%
1.06.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.235.700	18.235.700	100.00%
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	565.880.906	558.911.563	98.77%
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.880.000	5.879.910	100.00%
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	56.478.000	51.662.095	91.47%
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.200.000	900.000	75.00%
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan	502.322.906	500.469.558	99.63%



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

	Umum Kantor			
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181.883.850	167.362.980	92.02%
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53.143.850	38.887.980	73.17%
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.540.000	29.500.000	99.86%
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99.200.000	98.975.000	99.77%
1.6.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.718.357.700	1.708.973.630	99.45%
1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	1.718.357.700	1.708.973.630	99.45%
1.06.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan	640.500.000	639.393.850	99.83%
1.06.04.1.05.0002	Penyediaan Sandang	227.468.900	225.441.900	99.11%
1.06.04.1.05.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	327.219.400	321.524.030	98.26%
1.06.04.1.05.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	24.726.050	24.725.750	100.00%
1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik. Mental. Spritual dan Sosial	150.464.000	150.463.750	100.00%



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

1.06.04.1.05.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	153.100.000	153.100.000	100.00%
1.06.04.1.05.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	194.879.350	194.324.350	99.72%

3.3. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan.

1. Kegiatan yang tidak terlaksana realisasi dibawah 70 % sebagai berikut:

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	KETERANGAN
1.06.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	47.343.000	15.584.000	32.92%	Pembayaran Biaya Notaris terhadap pembuatan balik nama Sertifikat Tanah Dinas Sosial Provinsi tidak jadi digunakan
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.500.000	2.000.000	10.81%	Tidak adanya publikasi dan Dialog Interaktif pada Dinas Sosial
1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang	19.950.000	-	0.00%	Tidak tersalurnya bantuan di karenakan anak dalam panti yang akan disalurkan tidak ada
1.06.04.1.01.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	164.335.500	107.287.200	65.29%	Sisa perjalanan dinas dan sewa yang tidak jadi dilaksanakan
1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan	24.000.000	9.000.000	37.50%	Tidak ada klien yang meninggal dunia di dalam panti
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.108.500	16.379.125	67.94%	Pembelian UPS tidak jadi dilaksanakan karena tidak sesuai spesifikasi



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

2. Kegiatan yang realisasi keuangannya dibawah 90% kegiatannya sebagai berikut:

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	KETERAANGAN
1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	114.605.500	98.997.900	86.38%	Sisa anggaran yang tidak terpakai lagi
1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	101.145.900	87.299.980	86.31%	Sisa anggaran yang tidak terpakai lagi
1.06.01.1.03.0004	Pembinaan. Pengawasan. dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	42.790.000	36.140.000	84.46%	Sisa anggaran yang tidak terpakai lagi
1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	33.915.100	29.015.600	85.55%	Sisa anggaran yang tidak terpakai lagi
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.758.000	20.758.000	87.37%	Sisa anggaran yang tidak terpakai lagi
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.360.000	17.040.915	83.70%	Sisa anggaran yang tidak terpakai lagi
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.594.100	16.301.100	87.67%	Sisa anggaran yang tidak terpakai lagi
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.210.000	2.565.000	79.91%	Sisa anggaran yang tidak terpakai lagi
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.550.000	37.600.000	80.77%	Sisa anggaran yang tidak terpakai lagi



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.805.170	48.097.000	86.19%	Sisa anggaran yang tidak terpakai lagi
1.06.04.1.02.0013	Koordinasi. Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1.017.378.294	881.746.675	86.67%	Sisa anggaran yang tidak terpakai lagi
1.06.04.1.03.0013	Koordinasi. Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	198.395.700	171.277.300	86.33%	Sisa anggaran yang tidak terpakai lagi
1.06.04.1.04.0011	Koordinasi. Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	57.016.100	49.241.000	86.36%	Sisa anggaran yang tidak terpakai lagi
1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Perumahan	258.626.500	182.661.810	70.63%	Sisa anggaran yang tidak terpakai lagi
1.06.01.1.03.0004	Pembinaan. Pengawasan. dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	3.260.000	2.550.000	78.22%	Sisa anggaran yang tidak terpakai lagi



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	105.867.000	85.462.230	80.73%	Sisa anggaran yang tidak terpakai lagi
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.250.000	14.452.800	88.94%	Sisa anggaran yang tidak terpakai lagi
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.680.000	8.681.000	89.68%	Sisa anggaran yang tidak terpakai lagi
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	157.657.200	116.015.129	73.59%	Sisa anggaran yang tidak terpakai lagi
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	425.224.000	375.117.436	88.22%	Sisa anggaran yang tidak terpakai lagi
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	67.150.000	49.104.970	73.13%	Sisa anggaran yang tidak terpakai lagi
1.06.01.1.03.0004	Pembinaan. Pengawasan. dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	3.474.000	2.754.000	79.27%	Sisa anggaran yang tidak terpakai lagi
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	86.767.375	62.017.420	71.48%	Sisa anggaran yang tidak terpakai lagi
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	86.767.375	62.017.420	71.48%	Sisa anggaran yang tidak terpakai lagi



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.750.000	27.487.750	83.93%	Sisa anggaran yang tidak terpakai lagi
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.200.000	900.000	75.00%	Sisa anggaran yang tidak terpakai lagi
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53.143.850	38.887.980	73.17%	Sisa anggaran yang tidak terpakai lagi



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTASI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja serta penyajian laporan keuangan. Penyusunan neraca mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan.

Entitas Akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu SKPD Pengguna Anggaran yang memiliki peran sebagai entitas akuntansi. Selama tahun anggaran 2024 Dinas Sosial selaku entitas akuntansi, telah menyelenggarakan sistem akuntansi secara komprehensif, atas pelaksanaan penatausahaan dan akuntansi pelaksanaan anggaran dengan menyusun dan menyampaikan laporan keuangan berbasiskan akrual berupa laporan Realisasi Anggaran, neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional dan Catatan Atas Laporan Keuangan.



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah basis akrual, di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Pendapatan adalah semua penerimaan yang masuk ke rekening kas daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat diterima di Kas umum Daerah.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Kas Umum Daerah.

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antar aktiva dan hutang, yang terdiri dari ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan.

Mutasi pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas, menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas.

4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

4.3.1. Pengukuran / Penilaian Aset

a. Kas.

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya.

b. Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
- Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

c. Tanah.

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

d. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan gedung dan bangunan tersebut. Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

e. Peralatan dan Mesin.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas peralatan dan mesin yang berasal dari pembelian, meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan peralatan dan mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

f. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan melalui kontrak, meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

g. Aset tetap lainnya.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan aset tetap lainnya melalui kontrak, meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan aset tetap lainnya secara swakelola, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

h. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyusutan nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset
- Nilai buku adalah nilai aset yang tertera pada catatan dan informasi akun dalam daftar aset, biasanya yang dicatat adalah harga ketika aset tersebut dibeli.
- Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas Pemerintah dan atau pelayanan publik.
- Metode Penyusutan Aset tetap digunakan dengan metode garis lurus.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos neraca daerah telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada tahun 2005, dilaksanakan penyusunan neraca awal Pemerintah Propinsi Sumatera Barat. Seiring hal tersebut mulai tahun 2014 telah dilaksanakan penilaian kembali



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

atas seluruh aset tetap daerah dengan melakukan penyusutan aset tetap. Untuk pengadaan jenis aset yang masa perolehan/pengadaan pada tahun 2008, penyajiannya telah berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran, berdasarkan Pergub No. 5 tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015.



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1.1. PENDAPATAN LRA

Sehubungan SKPD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dimana tupoksinya melakukan pemberdayaan, pelayanan dan rehabilitasi sosial serta perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat dan merupakan SKPD yang tidak mempunyai pendapatan.

5.1.2. BELANJA

1. Belanja Operasi

No	Perkiraan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
----	-----------	---------------	----------------	---	----------------

- a. **Belanja Pegawai 22.422.232.641,- 21.206.093.148,- 94,57 21.525.106.759,-**
Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 dan 2023. Untuk realisasi Tahun 2024 sebesar 94,58 % dari anggarannya.

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 terdapat pengurangan realisasi sebesar Rp. 319.013.611,-. Belanja Pegawai ini terdiri dari belanja langsung berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan kondisi kerja ASN serta tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN. Rincian untuk belanja pegawai dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	Perkiraan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	12.114.349.183,-	11.873.797.223,-	11.709.074.206,-
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	9.505.443.458,-	8.530.695.925,00	9.242.152.553,-
3	Tambahan	802.440.000,-	801.600.000,-	573.880.000,-



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

	Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya PNS :			
	Jumlah Belanja Pegawai	22.422.232.641,-	21.206.093.148,-	21.525.106.759,-

Sisa Belanja Pegawai sejumlah Rp. 1.216.139.493,- adalah sisa Gaji dan tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS yang tidak terealisasi karena adanya PNS yang pensiun dan meninggal dunia, serta sisa tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan kondisi kerja serta berdasarkan pertimbangan objektif lainnya PNS yang terdiri dari belanja honorarium yang tidak terpakai lagi, rinciannya sebagai berikut :

- Belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp. 240.551.960,-.
- Belanja Tambahan penghasilan PNS berdasarkan beban kerja sebesar Rp. 727.870.912,-.
- Belanja Tambahan penghasilan PNS berdasarkan kondisi kerja sebesar Rp. 246.876.621,-.
- Belanja honorarium sebesar Rp. 840.000,-.

No	Perkiraan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
----	-----------	---------------	----------------	---	----------------

b. **Belanja Barang & Jasa** 44.317.298.551,- 42.410.079.462,- 95,69 44.808.036.689,-

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2024 dan 2023. Untuk realisasi Tahun 2024 mencapai 95,70 % dari anggarannya.

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 terdapat penurunan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.2.397.957.227,-. Rincian Belanja barang dan jasa tahun 2024 ini terdiri dari :



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

No	Perkiraan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
-	Belanja Barang	18.715.237.844,-	18.345.749.033,-	98,03
-	Belanja Jasa	17.133.396.907,-	16.399.407.524,-	95,72
-	Belanja Pemeliharaan	765.251.000,-	749.201.996,-	97,90
-	Belanja Perjalanan Dinas	5.484.067.800,-	4.723.098.659,-	86,12
-	Belanja Uang/Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.219.345.000,-	2.192.622.250,-	98,80
	Jumlah	44.317.298.551,-	42.410.079.462,-	95,69

Khusus mengenai belanja Uang/Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat sebesar **2.192.622.250,-**. Adapun rinciannya dapat dilihat pada uraian dibawah ini :

No	Kegiatan	Jenis uang/jasa yang Diserahkan	Jumlah (Rp)
I	Belanja Uang/Jasa terdiri dari:		2.192.622.250,-
1	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan		2.132.732.250,-
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Uang	3.500.000,-
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Barang	19.560.000,-
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari di UPTD PSBN Padang	Uang saku	76.606.000,-
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial di UPTD PSAABR Budi Utama	Uang saku	271.840.000,-



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

	Lb.Alung		
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari di UPTD PSAABR Budi Utama Lb.Alung	Uang	137.250.000,-
	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar di UPTD PSAABR Budi Utama Lb.Alung	Uang	551.016.250,-
	Penyediaan Sandang di UPTD PSBR Harapan Padang Panjang	Uang	109.200.000,-
	Pemberian Bimbingan Fisik Mental, Spiritual dan Sosial di UPTD PSBR Harapan Padang Panjang	Uang	267.200.000,-
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari di UPTD PSAA Trimurni Padang Panjang	Uang	183.000.000,-
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari di UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin	Uang	177.925.000,-
	Pemulasaraan di UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin	Uang	2.500.000,-
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial PSTW Kasih Sayang Ibu Cubadak	Uang	103.285.000,-
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari PSTW Kasih Sayang Ibu Cubadak	Uang	3.460.000,-
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari di UPTD PSBGHI PADANG	Uang	146.400.000,-
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari di PSKW Andam Dewi Sukarami	Uang	79.900.000,-
2	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Sertifikat dan uang	11.250.000,-



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

3	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	Sertifikat dan uang	48.640.000-
---	--	---------------------	-------------

Saldo / jumlah belanja barang dan jasa tersebut diatas adalah jumlah netto setelah dikurangi pengembalian belanja barang dan jasa. Untuk 2024 pengembalian barang dan jasa sebesar Rp.140.878.376,-. Sisa dari belanja barang dan jasa sebesar Rp. 1.907.219.089,- terdiri dari :

- Belanja Barang sebesar Rp.369.488.811,-
- Belanja Jasa sebesar Rp.733.989.383,-
- Belanja Pemeliharaan sebesar Rp.16.049.004,-
- Belanja Perjalanan Dinas Rp.760.969.141,-
- Belanja Uang/Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp.26.722.750,-

Sisa anggaran belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.907.219.089,- adalah sisa anggaran belanja barang dan jasa yang tidak terealisasi karena sisa anggaran yang ada merupakan anggaran dalam proses kegiatan yang tidak dipergunakan lagi.

Dari realisasi belanja barang dan jasa, belanja jasa konsultasi, Belanja Jasa Perencana dan pemeliharaan ini sejumlah Rp.855.564.645- dikapitalisir menjadi aset tetap Gedung dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Dikapitalisir		855.564.645
-	Alat Pemadam/Portable (UPTD PSTW Sicincin)	40.000.000
-	Tabungan Oksigen (UPTD PSTW Sicincin)	13.200.000
-	Meja Pimpong (UPTD PSKW Andam Dewi Solok)	17.500.00
-	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.000.000



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

	(UPTD PSTW Sicincin)		
	- Jasa Konsultansi Perencanaan (UPTD PSTW KSI Batusangkar)		7.348.200
	- Jasa Konsultansi Pengawasan (UPTD PSTW KSI Batusangkar)		5.106.000
	- Jasa Konsultansi Pengawasan (Pembuatan Ruang Jemuran)		6.975.000
	- Jasa Konsultansi Perencanaan (Pembuatan ruang Jemuran)		10.304.000
	- Jasa Konsultansi Perencanaan (Gedung Multi layanan) PSKW Solok		49.600.661
	- Jasa Konsultansi Perencanaan (Bangunan Gedung Pos Jaga dan Wisma) PSKW Solok		12.400.165
	- Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor (UPTD PSKW Andam Dewi Solok)		98.975.000
	- Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Multilayanan (UPTD PSKW Andam Dewi Solok)		48.965.000
	- Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Multilayanan (UPTD PSKW Andam Dewi)		48.965.638
	- Jasa Konsultansi Perencanaan Pembuatan Pagar (UPTD PSKW Andam Dewi)		66.124.245
	- Jasa Konsultansi Perencanaann DED (UPTD PSKW Andam Dewi)		10.282.580
	- Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan		4.292.997



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

	(Dinas Sosial)		
	- Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Listrik (UPTD PSTW Sabai Nan aluih Sicincin)		249.800.000
	- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung (TMP Situjuah)		115.725.159

Dikapitalisirnya belanja barang tersebut sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

No	Perkiraan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
----	-----------	---------------	----------------	---	----------------

c. **Belanja Hibah** **41.572.305.450,-** **40.496.863.450,-** **97.41** **37.430.037.166,-**

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 dan 2023. Untuk realisasi Tahun 2024 mencapai 97.41% dari anggarannya. Rincian Belanja Hibah tahun 2024:

No	Perkiraan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%
-	Belanja Hibah Uang	41.572.305.450,-	40.496.863.450,-	97.41
-	Belanja Hibah Barang	-	-	-
	Jumlah	41.572.305.450,-	40.496.863.450,-	97.41

Adapun rincian hibah sebesar Rp. 40.496.863.450,- dapat dilihat pada uraian dibawah ini :



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

No	Kegiatan	Jenis uang/barang yang Diserahkan	Jumlah (Rp)
I	Belanja Hibah terdiri dari:		40.496.863.450,-
1	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar		40.496.863.450,-
A	REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS DI DALAM PANTI		6.073.956.800,-
	Penyediaan Permakanan	Uang	2.626.867.800,-
	Penyediaan Asrama Yang Mudah di Akses	Uang	2.024.317.000,-
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Uang	826.070.000,-
	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Uang	596.702.000,-
B	REHABILITASI SOSIAL DASAR ANAK TERLANTAR DI DALAM PANTI		33.244.695.650,-
	Penyediaan Makanan	Uang	27.127.467.750,-
	Penyediaan Sandang	Uang	269.957.000,-



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

No	Perkiraan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
----	-----------	---------------	----------------	---	----------------

2. **Belanja Modal 5.935.870.989,- 5.772.913.865,- 97,25 5.807.202.118,-**

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal tahun 2024 dan 2023. Realisasi tahun 2024 mencapai 97,25% dari anggarannya. Sisa anggaran Belanja modal sebesar **Rp. 162.957.124,-** adalah sisa anggaran belanja Modal yang tidak terealisasi sisa anggaran yang tidak dipergunakan lagi.

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 terdapat penurunan sebesar Rp **34.288.253,-**. Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Belanja Modal dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	Perkiraan	Anggaran 2024	Realisasi 2024
1.	Peralatan dan Mesin	850.477.700	836.825.164
-	Alat Besar	19.618.000	19.618.000
-	Alat Angkutan	36.686.600	35.899.500
-	Alat Kantor dan Rumah Tangga	592.503.250	587.428.184
-	Alat studio, Komunikasi, dan Pemancar	21.737.000	21.682.000
-	Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.696.250	1.600.000
-	Alat Komputer	178.236.600	170.597.480
2.	Gedung dan Bangunan	5.085.393.289	4.936.088.701
-	Bangunan Gedung Tempat Kerja	5.085.393.289	4.936.088.701
-	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	-	-
3.	Aset Tetap Lainnya	0,-	0,-



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

No	Perkiraan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	850.477.700,-	836.825.164,-	98,39	4.469.998.171,-

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin tahun 2024 dan 2023. Realisasi tahun 2024 mencapai 98,39% dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 terdapat penurunan sebesar Rp. 3.633.173.007,-. Adapun rincian objek belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari:

NO	URAIAN	Jumlah	Realisasi 2024
1	Sound System	1 unit	7.945.000
2	Kursi	30 unit	19.050.000
3	Smart TV 43 Inch	1 unit	5.658.000
4	AC Split 1,5 PK	1 unit	14.827.000
5	Personal Computer	1 unit	18.000.000
6	Printer Epson L5590	3 Unit	21.600.000
7	Laptop	1 unit	14.366.600
8	Printer	1 unit	3.440.000
9	Papan Nama Kepemilikan Aset Tanah Kuburan	2 unit	8.000.000
10	Kursi Kerja Pejabat	1 unit	2.290.000
11	Komputer	1 unit	14.970.000
12	Laptop	1 unit	11.650.000
13	Alat Terapi	1 unit	1.600.000
14	Lemari Kaca	1 unit	5.000.000
15	Kursi Rapat	4 unit	7.940.000
16	Kulkas	1 unit	3.250.000



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

17	AC Split	1 unit	5.000.000
18	Printer	1 unit	5.850.000
19	Mesin Jahit Konveksi	1 unit	84.915.000
21	Projector	1 unit	8.680.000
22	Alat Penghancur Kertas	1 unit	1.806.500
23	Lemari Pakaian	7 unit	34.498.800
24	Printer	1 unit	3.440.000
25	Scanner	1 unit	5.000.000
26	Dispenser	3 unit	6.000.000
27	Handy Talky (HT)	3 unit	13.737.000
38	Pompa Air	1 unit	13.192.000
39	Pompa Air	2 unit	6.426.000
40	Personal Komputer	1 unit	17.707.000
31	Laptop	1 unit	17.830.000
32	Tempat Tidur Bertingkat	1 unit	74.758.500
33	Sofa Tamu	2 unit	24.000.000
34	Lemari Kelayan	10 unit	38.850.000
35	Meja Belajar Kelayan	20 unit	39.960.000
36	Kursi Tamu	3 unit	17.982.000
37	Tempat Tidur Bertingkat	5 unit	16.927.500
38	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1 unit	35.899.500
39	Filling Cabinet	2 unit	5.000.000
40	Lemari Besi	2 unit	6.400.000
41	Lemari Kayu 120x40x75 cm	1 unit	3.288.000
42	Lemari Kayu 80x40x219 cm	2 unit	10.134.000
43	Lemari Besi/Metal	4 unit	24.204.000



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

44	Papan Tulis	2 unit	3.299.200
45	Kursi Besi	50 unit	31.800.000
46	Rak Piring	1 unit	4.650.000
47	Kulkas	2 unit	10.000.000
48	CCTV	1 unit	52.500.000
49	Layar Proyektor	1 unit	8.700.000
50	Printer	1 unit	5.700.480
51	P.C Unit	1 unit	13.663.400
52	Mesin Obras	2 unit	11.427.000
53	Meja Belajar	3 unit	6.000.000
54	Penghisap Debu/Vacum Cleaner	1 unit	2.287.356
55	Dispenser	2 unit	5.725.328
Jumlah			836.825.164,-

Dari realisasi aset tetap peralatan dan mesin ini sejumlah **Rp.50.850.000,-** merupakan belanja tidak dikapitalisir menjadi belanja peralatan/perlengkapan pakai habis dengan rincian sebagai berikut :

**Belanja peralatan/perlengkapan pakai
habis**

	Harga Satuan	Total
- Kursi Besi (50 Unit)	636.000	31.800.000
- Kursi Futura (30 Unit)		635.000
		19.050.000

Sisa Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah **Rp. 13.652.536,-** adalah sisa anggaran yang tidak dipergunakan lagi.

No	Perkiraan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
2.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.085.393.289,-	4.936.088.701,-	97,06	1.337.203.947,-



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan tahun 2024 dan 2023. Realisasi tahun 2024 mencapai 97,06% dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 terdapat kenaikan sebesar Rp. 3.598.884.754,-. Adapun rincian objek belanja modal Gedung dan Bangunan terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah	Realisasi
1	Bangunan Gedung Sentral Rehabilitasi Sosial Multilayanan UPTD PSKW Andam Dewi Solok	1 Keg	1.252.802.800,-
2	Tempat Jemuran Kelayan UPTD PSKW Andam Dewi Solok	1 Keg	115.695.300,-
3	Rehab Gedung Dinas Sosial	1 Keg	85.043.385,-
4	Rehab Pagar Dinas Sosial	1 Keg	34.943.000,-
5	Rehabilitasi Dinding & Septik Tank Dinas Sosial	1 Keg	13.064.700,-
6	Rehap Gedung Tempat Pertemuan (Aula) UPTD PSTW KSI Batusangkar	1 Keg	197.249.400,-
7	Bangunan Gedung Kantor Non Sederhana Sentral UPTD PSKW Andam Dewi Solok	1 Keg	1.461.600.000,-
8	Bangunan Gedung Fasilitas Umum UPTD PSKW Andam Dewi Solok	1 Keg	8.800.000,-
9	Bangunan Gedung UPTD PSKW Andam Dewi Solok	1 Keg	126.200.000,-
10	Bangunan Gedung Fasilitas Umum UPTD PSKW Andam Dewi Solok	1 Keg	800.000,-
11	Bangunan Gedung Multilayanan UPTD PSKW Andam Dewi Solok	1 Keg	1.461.606.719,-
12	Bangunan Gedung Pos Jaga dan Wisma UPTD PSKW Andam Dewi Solok	1 Keg	168.479.600,-



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

13	Mesin Pompa Air UPTD PSBGHI Padang	1 Keg	9.803.797,-
	Jumlah		4.936.088.701,-

Dari jumlah diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pengadaan gedung kantor terdiri dari 11 unit kegiatan dengan uraian:
 - a. Bangunan Gedung Sentral Rehabilitasi Sosial Multilayanan UPTD PSKW Andam Dewi Solok.
 - b. Pembuatan Tempat Jemuran Kelayan UPTD PSKW Andam Dewi Solok
 - c. Rehab Gedung Dinas Sosial Prov.Sumbar
 - d. Rehab Pagar Dinas Sosial Prov.Sumbar
 - e. Rehabilitasi Dinding & Septik Tank Dinas Sosial Prov.Sumbar
 - f. Rehap Gedung Tempat Pertemuan (Aula) UPTD PSTW KSI Batusangkar
 - g. Bangunan Gedung Kantor Non Sederhana Sentral UPTD PSKW Andam Dewi Solok
 - h. Bangunan Gedung Fasilitas Umum UPTD PSKW Andam Dewi Solok
 - i. Bangunan Gedung UPTD PSKW Andam Dewi Solok
 - j. Bangunan Gedung Fasilitas Umum UPTD PSKW Andam Dewi Solok
 - k. Bangunan Gedung Multilayanan UPTD PSKW Andam Dewi Solok
 - l. Bangunan Gedung Pos Jaga dan Wisma UPTD PSKW Andam Dewi Solok
 - m. Mesin Pompa Air UPTD PSBGHI Padang

Dari realisasi aset tetap Gedung dan Bangunan ini sejumlah **Rp.204.969.393,-** merupakan belanja tidak dikapitalisir menjadi belanja pemeliharaan dengan rincian sebagai berikut :

**Belanja peralatan/perlengkapan pakai
habis**

	Harga Satuan	Total
- Pemeliharaan Gedung	57.762.802	57.762.802



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

- Pemeliharaan Gedung	13.064.700	13.064.700
- Pemeliharaan Aula	134.141.891	134.141.891

Sisa Belanja Modal Gedung dan Bangunan sejumlah **Rp. 149.304.588,-** adalah sisa kontrak yang tidak dipergunakan lagi.

No	Perkiraan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
3	Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan	0,-	0,-	0	0,-

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2024 dan 2023. Tidak ada anggaran belanja modal jalan, irigasi dan jaringan untuk tahun 2024.

No	Perkiraan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,-	0,-	0	0,-

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024 dan 2023. Tahun 2024 untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tidak ada Anggaran.



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

5.2. PENJELASAN NERACA

5.2.1. Aset

Aset Lancar

Perkiraan	2024	2023 (Audited)
-----------	------	----------------

1. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,-	4.100.000,-
---------------------------------	-----	-------------

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023. Pada tahun 2023 terdapat uang sebesar Rp.4.100.000,- dikas bendahara pengeluaran ini disebabkan karena adanya keterlambatan pengembalian belanja honorarium pada anggaran belanja tahun 2023. Sedangkan Sampai dengan 31 Desember 2024, sisa UYHD sebesar Rp 634.376.141,- telah disetorkan ke Kas Daerah pada bulan Desember 2024. Semua pengembalian belanja dan pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran telah disetorkan ke Kas daerah pada akhir tahun 2024.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Kas dibendahara pengeluaran	0,-	110.661.204.442,-	110.661.204.442,-	,-

Penambahan adalah jumlah SP2D UP + GU+TU+LS rinciannya sebagai berikut:

$(2.767.955.000 + 24.901.066.315 + 0 + 82.992.183.127 = 110.661.204.442)$.

Pengurangan adalah jumlah SPJ GU+TU+LS+CP + Sisa UHYD. Rinciannya:

$(26.989.766.798 + 0 + 82.896.183.127 + 140.878.376 + 634.376.141 = 110.661.204.442)$.

Rincian sisa UYHD dan penyetorannya dapat dilihat pada Lampiran 5.

Perkiraan	2024	2023 (Audited)
-----------	------	----------------

1. Setara Kas	0,00,-	0,00,-
---------------	--------	--------



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

Jumlah tersebut merupakan saldo kas lainnya pada Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023. Pada tahun 2024 dan 2023 tidak terdapatnya Aset Lancar yang setara kas.

Perkiraan	2024	2023(Audited)
-----------	------	---------------

2. Beban Dibayar Dimuka	26.774.906,00,-	25.347.908,34,-
--------------------------------	------------------------	------------------------

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Bayar Dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023, yaitu beban jasa dibayar dimuka /beban sewa dibayar dimuka yang terdiri dari :

- a. Asuransi Kendaraan Bermotor BA 8377 B Isuzu D-MAX DC 2.5 L MT tahun pembuatan 2019, dengan periode Asuransi tanggal 15 Maret 2024 s/d 15 Maret 2025 sebesar Rp. 7.991.150,-.

Dengan perhitungan yang menjadi beban dibayar dimuka per Desember tahun 2024 sebesar: Rp. 7.991.150,- : 12 bulan = Rp. 665.929,167,- x 10 bulan = Rp. **6.659.291,67,-**.
Sedangkan jumlah beban dibayar dimuka yang akan dibayarkan untuk tahun selanjutnya yakni sampai tanggal 15 Maret 2025 sebesar : Rp. 7.991.150,- : 12 bulan = Rp. 665.929,167,- x 2 bulan = Rp. **1.331.858,-**

- b. Asuransi Kendaraan Bermotor BA. 1037 Q Toyota Avanza VELOZ M/T/ Minibus tahun pembuatan 2018, dengan periode Asuransi tanggal 28 April 2024 sampai dengan 28 April 2025 sebesar Rp. 4.875.660,-.

Dengan perhitungan yang menjadi beban dibayar dimuka per Desember tahun 2024 sebesar: Rp. . 4.875.660,- : 12 bulan = Rp. 406.305,- x 8 bulan = Rp. **3.250.440,-**.
Sedangkan jumlah beban dibayar dimuka yang akan dibayarkan untuk tahun selanjutnya yakni sampai tanggal 28 April 2025 sebesar: 4.875.660,- : 12 bulan = Rp. 406.305,- x 4 bulan = Rp.**1.625.220,-**

- c. Asuransi Kendaraan Bermotor BA. 1737 B Toyota Kijang Inova Minibus tahun pembuatan 2012, dengan periode Asuransi tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan 15 Maret 2025 sebesar Rp. 5.534.288,-.



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

Dengan perhitungan yang menjadi beban dibayar dimuka per Desember tahun 2024 sebesar: Rp. 5.534.288,- : 12 bulan = Rp. 461.190.667,- x 10 bulan = Rp. **4.611.906,67,-**.
Sedangkan jumlah beban dibayar dimuka yang akan dibayarkan untuk tahun selanjutnya yakni sampai tanggal 15 Maret 2025 sebesar: Rp. 5.534.288,- : 12 bulan = Rp. 461.190.667,- x 2 bulan = Rp. **922.381,-**

- d. Asuransi Kendaraan Bermotor BA. 70 Isuzu MU-X R2/JEEP tahun pembuatan 2017, dengan periode Asuransi tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan 15 Maret 2025 sebesar Rp. 7.639.700,-.

Dengan perhitungan yang menjadi beban dibayar dimuka per Desember tahun 2024 sebesar: Rp. 7.639.700,- : 12 bulan = Rp. 636.641,67,- x 10 bulan = Rp. **6.366.146,67,-**.
Sedangkan jumlah beban dibayar dimuka yang akan dibayarkan untuk tahun selanjutnya yakni sampai tanggal 15 Maret 2025 sebesar: Rp. 7.639.700,- : 12 bulan = Rp. 636.641,67,- x 2 bulan = Rp. **1.273.283,-**.

- e. Asuransi Kendaraan Bermotor BA. 1255 B Toyota Avanza 1.5 Veloz M tahun pembuatan 2022 dengan periode Asuransi tanggal 22 April 2024 sampai dengan 22 April 2024 sebesar Rp. 5.111.250,-.

Dengan perhitungan yang menjadi beban dibayar dimuka per Desember tahun 2024 sebesar: Rp. 5.111.250,- : 12 bulan = Rp. 425.937,5,- x 8 bulan = Rp. **3.407.496,-**.
Sedangkan jumlah beban dibayar dimuka yang akan dibayarkan untuk tahun selanjutnya yakni sampai tanggal 22 April 2025 sebesar : Rp. 5.111.250,- : 12 bulan = Rp. 425.937,5,- x 4 bulan = Rp. **1.703.750,-**

- f. Asuransi Kendaraan Bermotor BA. 9137 BK Isuzu NMR81U-LAYIN4 4x2 M/T tahun pembuatan 2023 dengan periode Asuransi tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan 9 Oktober 2025 sebesar Rp. 7.417.000,-.

Dengan perhitungan yang menjadi beban dibayar dimuka per Desember tahun 2024 sebesar: Rp. 7.417.000,- : 12 bulan = Rp. 618.083,33,- x 3 bulan = Rp. **1.854.250,-**.
Sedangkan jumlah beban dibayar dimuka yang akan dibayarkan untuk tahun selanjutnya yakni sampai tanggal 9 Oktober 2025 sebesar : Rp. 7.417.000,- : 12 bulan = Rp. 618.083,33 x 9 bulan = Rp. **5.562.750,-**



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

g. Asuransi Kendaraan Bermotor BA 8570 QA tahun pembuatan 2023 dengan periode Asuransi tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan 9 Desember 2025 sebesar Rp. 8.571.150,-

Dengan perhitungan yang menjadi beban dibayar dimuka per Desember tahun 2024 sebesar: Rp. 8.571.150,- : 12 bulan = Rp. 714.262,5 x 1 bulan = Rp. 714.262,5,-, Sedangkan jumlah beban dibayar dimuka yang akan dibayarkan untuk tahun selanjutnya yakni sampai tanggal 01 Desember 2025 sebesar: Rp. 8.571.150 : 12 bulan = Rp. 714.262,5 x 11 bulan = Rp 7.856.887,-

h. Asuransi Kendaraan Bermotor BA 1404 O tahun pembuatan 2023 dengan periode Asuransi tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan 1 Desember 2025 sebesar Rp. 7.089.575,-.

Dengan perhitungan yang menjadi beban dibayar dimuka per Desember tahun 2024 sebesar: Rp. 7.089.575,- : 12 bulan = Rp. 590.797.92 x 1 bulan = Rp. Rp. 590.797.92,-. Sedangkan jumlah beban dibayar dimuka yang akan dibayarkan untuk tahun selanjutnya yakni sampai tanggal 01 Desember 2025 sebesar: Rp. 7.089.575,- : 12 bulan = Rp. 590.797.92 x 1 bulan = Rp. **6.498.777,-**

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Premi Asuransi	25.347.908,-	117.788.334,-	119.215.332,-	26.774.906,-

Penambahan adalah jumlah belanja premi asuransi selama tahun 2024 terdiri dari premi kendaraan bermotor BA.1737 B, BA.1037 Q, BA. 8373 A,BA. 58, BA. 9137 BK,BA 1255 B, BA 8570 QA, dan BA 1404 O.

Pengurangan adalah jumlah premi asuransi yang menjadi beban selama tahun 2023.

Daftar Beban Bayar dimuka dapat dilihat pada Lampiran 11.



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

Perkiraan	2024	2023 (Audited)
-----------	------	----------------

i. **Persediaan** 264.307.399,- 9.449.194,-

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH	
		TAHUN 2024	TAHUN 2023
A	PERSEDIAAN	264.307.399	9.449.194
1	Bahan Bakar dan Pelumas	9.829.050	-
2	Bahan Lainnya	231.500	130.500
3	Alat Tulis Kantor	1.988.250	1.568.535
4	Bahan Cetak	560.000	1.050.000
5	Alat Listrik	5.355.700	1.709.169
6	Perlengkapan Dinas	-	67.000
7	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	175.760.300	2.523.400
8	Obat	3.416.099	2.400.590
9	Persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat	29.775.000	-
10	Natura	37.391.500	-

Penambahan dan pengurangan persediaan dapat diuraikan sebagai berikut :

URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
PERSEDIAAN	9.449.194	5.860.337.725,25	5.599.351.8219,25	264.307.399
Bahan Bakar dan Pelumas	-	500.219.436	510.048.486	9.829.050
Bahan Lainnya	130.500	561.506.050	561.405.050	231.500
Alat Tulis Kantor	1.568.535	323.057.650	322.637.935	1.988.250
Bahan Cetak	1.050.000	299.018.500	299.508.500	560.000
Alat Listrik	1.709.169	187.801.900	184.155.369	5.355.700
Perlengkapan Dinas	67.000	575.000	642.000	-
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.523.400	3.539.514.524	3.366.344.624	175.760.300



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

Obat	2.400.590	171.826.930	170.811.421	3.416.099
Persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat	-	694.955.25	651.980.250	29.775.000
Natura	-	276.122.780	238.731.280	37.391.500

Penambahan adalah adanya penambahan belanja di Dinas dan UPTD tahun 2024 yang terdiri dari ATK, Alat listrik dan Elektronik, Bahan Pembersih, Bahan Pakai Habis Lainnya, Bahan Obat-Obatan, Alat Praktek dan Bahan Cetak sebesar Rp. **295.629.991,-**

Pengurangan adalah adanya pengurangan kebutuhan ATK dan alat rumah kantor di Dinas dan UPTD yang terdiri dari ATK, Alat listrik dan Elektronik, Bahan Pembersih, Bahan Pakai Habis Lainnya, Bahan Obat-Obatan, Alat Praktek dan Bahan Cetak, barang logistik yang akan diberikan kepada pihak ketiga sebesar Rp. **35.247.086**

Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 16.

Aset Tetap

Perkiraan	2024	2023(Audited)
-----------	------	---------------

- | | | |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Tanah | 21.690.396.000,- | 21.690.396.000,- |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dan 2023 .

1) Dasar Penilaian

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| a. Neraca Awal 2005 | Rp. 21.630.484.000,00 |
| b. Harga Perolehan 2006 sd 2024 | Rp. 59.912.000,00 |

Daftar Tanah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dalam bentuk KIB A, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Tanah	21.690.396.000,-	-	-	21.690.396.000,-

Saldo Audited 2023	21.690.396.000,-
<u>Mutasi Tambah</u>	-
Total Mutasi Tambah	-
Saldo per 31 Des 2024	21.690.396.000,-

Perkiraan	2024	2023 (Audited)
-----------	------	----------------

2. Peralatan dan Mesin	21.922.790.638,90	22.549.563.301,81
-------------------------------	--------------------------	--------------------------

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dan 2023.

1) Dasar Penilaian

- a. Neraca Awal 2005 Rp. 1.670.445.563,00
- b. Harga Perolehan 2006 sd 2024 Rp 20.252.345.075,90

Daftar Peralatan dan Mesin Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Peralatan & Mesin	22.549.563.301,81	917.328.961,00	1.544.101.623,91	21.922.790.638,90
Akm Peny Peralatan & Mesin	17.608.527.395,81	1.429.596.078,19	1.477.771.623,91	17.560.351.850,09
Nilai Buku	4.941.035.906,00	2.414.464.464,91	2.993.061.582,10	4.362.438.788,81

Saldo Audited 2023	22.549.563.301,81,-
<u>Mutasi Tambah</u>	917.328.961,00,-
Belanja Modal tahun 2024	836.825.164,00,-
Belanja Barang dan Jasa dikapitalisir 2024	70.700.000,00,-
Reklas dari Gedung & Bangunan	9.803.797,00,-
Mutasi antar SKPD	0,00,-
<u>Mutasi Kurang</u>	1.544.101.623,91,-
Reklas ke Peralatan dan Mesin	1.493.251.623,91,-
Belanja Modal tidak dikapitalisir 2023	50.850.000,00,-
Penghapusan	
Mutasi antar SKPD	
Koreksi Saldo Awal	
Total Mutasi	(626.772.662,91,-)
Saldo per 31 Des 2024	21.922.790.638,90,-



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

Penjelasan Mutasi Tambah

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 836.825.164,00- telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
- Belanja Barang yang di Kapitalisir senilai Rp. 70.700.000,00 adapun rinciannya dapat dilihat pada lampiran 23
- Reklas dari Gedung dan Bangunan Rp. 9.803.797,00

Penjelasan Mutasi Kurang

- Belanja Modal tidak Dikapitalisir Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 50.850.000,- Adapun rinciannya dapat dilihat pada lampiran 22
- Reklasifikasi Peralatan dan Aset Tidak Bermanfaat ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 1.493.251.623,91

Perkiraan	2024	2023(Audited)
-----------	------	---------------

3. Gedung dan Bangunan **59.362.591.210,33,-** **53.884.009.078,33,-**

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dan 2023 .

1) Dasar Penilaian

- a. Neraca Awal 2005 Rp. 30.608.338.000,00
- b. Harga Perolehan 2006 sd 2023 Rp. 28.754.253.210,33

Daftar Gedung dan Bangunan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dalam bentuk KIB C, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Gedung & Bangunan	53.884.009.078,33,-	5.875.204.726,00,-	396.622.594,00,-	59.362.591.210,33,-
Akm Peny Gedung & Bangunan	23.006.928.187,57,-	1.144.049.681,79,-	0,-	24.150.977.869,36,-
Nilai buku	30.877.082.890,76,-	7.118.832.142,00,-	2.784.299.691,79,-	35.211.613.340,97,-

Saldo Audited 2023 **53.884.009.078,33,-**

Mutasi Tambah **5.875.204.726,00,-**

Belanja Modal tahun 2024 4.936.088.701,00,-

Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 911.156.025,00,-

Koreksi Tambah Nilai 27.960.000,00,-

Reklas dari jalan, irigasi & Jaringan 0,00,-

Mutasi Kurang **396,622,594.00,-**

Reklas 191.653.201,00,-

Belanja modal Tidak dikapitalisir 2024 204,969,393.00,-

Koreksi Saldo Awal 0,00,-

Penghapusan 0,00,-

Total Mutasi **5.478.582.132,00,-**

Saldo per 31 Des 2023 **59.362.591.210,33,-**

Penjelasan Mutasi Tambah

- a) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. **5.875.204.726,00,-** telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Gedung dan Bangunan.



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

b) Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 pada gedung dan bangunan senilai Rp. 911.156.025,00,-. Adapun rinciannya ;

1. Gedung dan Bangunan senilai Rp. 784.864.645,00 dapat dilihat pada lampiran 23.
2. Bangunan Gedung Kantor senilai Rp. 126.291.380,00 Pengakuan Hutang Belanja Modal Bangunan Gedung TA 2024 pada lampiran 13

Penjelasan Mutasi Kurang

- Reklas dari gedung dan bangunan sebesar Rp. 191.653.201,00,- dan mutasi kurang belanja modal tidak dikapitalisir 2024 sebesar 204.969.393,00,-. dapat dilihat lampiran 22

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Lampiran 24.

Perkiraan	2024	2023 (Audited)
-----------	------	----------------

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

0,00,-

0,00,-

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Jalan Irigasi dan Jaringan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dan 2023 .

1) Dasar Penilaian,

- a. Neraca Awal 2005 Rp 0,00,-
- b. Harga Perolehan 2006 sd 2023 Rp. 0,00,-

Daftar Jaringan,Irigasi dan Jaringan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dalam bentuk KIB D, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Sosial



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Jln Irigasi & Jaringan	0,00,-	0,00,-	0,00,-	0,00-
Akm Jln Irigasi & Jaringan	0,00,-	0,00,-	0,00,-	0,00-
Nilai Buku	0,00,-	0,00,-	0,00,-	0,00-

Saldo Audited 2023	0,00,-
<u>Mutasi Tambah</u>	0,00,-
Belanja Modal Tahun 2024	0,00,-
<u>Mutasi Kurang</u>	0,00,-
Reklas ke Gedung dan Bangunan	0,00,-
Saldo per 31 Des 2024	0,00,-

Penjelasan Mutasi Tambah

Tidak ada mutasi tambah untuk jalan, irigasi dan jaringan pada tahun 2023.

Penjelasan Mutasi Kurang

Tidak ada mutasi kurang untuk jalan, irigasi dan jaringan pada tahun 2024.

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Lampiran 24.

Perkiraan	2024	2023 (Audited)
-----------	------	----------------

5. Aset Tetap Lainnya

719.767.559,00

604.042.400,00



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dan 2023 .

1) Dasar Penilaian

- a. Neraca Awal 2005 Rp. 0,00
- b. Harga Perolehan 2006 sd 2024 Rp. **719.767.559,00**

Daftar Aset Tetap Lainnya Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dalam bentuk KIB E, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tetap Lainnya	604.042.400,00,-	115,725,159.00,-	0,00,-	719.767.559,00,-
Akm Peny Aset Tetap Lainnya	357.562.400,00,-	0,00,-	0,00,-	357.562.400,00,-
Nilai Buku	246.480.000,00,-	0,00,-	0,00,-	362.205.159,00,-

Saldo Audited 2023	604.042.400,-
<u>Mutasi Tambah</u>	0,00,-
Belanja Modal tahun 2024	0,00,-
Belanja Barang dan Jasa dikapitalisir tahun 2024	0,00,-
Koreksi Saldo Awal	0,00,-



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

Reklas	115.725.159,00,-
Mutasi Kurang	0,00,-
Koreksi Saldo Awal	0,00,-
Total Mutasi	0,00,-
Saldo per 31 Des 2024	719.767.559,00,-

Penjelasan Mutasi Tambah

- Mutasi Tambah untuk aset tetap lainnya pada tahun 2024 sebesar Rp. 115.725.159,- yang merupakan reklas dari Gedung dan Bagunan.

Penjelasan Mutasi Kurang

Tidak ada mutasi kurang untuk aset tetap lainnya pada tahun 2024

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Lampiran 24.

Perkiraan	2024	2023(Audited)
6. Akumulasi Penyusutan	42.068.892.119,45	40.973.017.983,38

Terdiri dari :

- Akumulasi Penyusutan Peralatan & Mesin	(17.560.351.850,09)	(17.608.527.395,81)
- Akumulasi Penyusutan Gdg & Bangunan	(24.150.977.869,36)	(23.006.928.187,57)
- Akumulasi Penyusutan Jln,Irigasi & Jaringan	(0,00)	(0,00)
- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(357.562.400,00)	(357.562.400,00)



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akm.Peralatan dan Mesin	17.608.527.395,81	1.429.596.078,19	1.477.771.623,91	17.560.351.850,09
Akm.Gedung dan Bangunan	23.006.928.187,57	1.144.049.681,79 ,-	0,-	24.150.977.869,36
Akm.Jln Irigasi & Jaringan	-	-	-	-
Akm Aset Tetap Lainnya	357.562.400,00	-	-	357.562.400,00
Jumlah Akm Penyusutan	40.973.017.983,38	2.573.645.759,98	1.477.771.623,91	42.068.892.119,45

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap posisi 31 Desember 2024 dan 2023. Akumulasi Penyusutan ini terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya, dan Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut :

Uraian	Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Jln Irigasi & Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Aset Lainnya
SALDO AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2023 (NERACA Audited)	17.608.527.395,81	23.006.928.187,57	-	357.562.400,00	4.000.000,00



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

JUMLAH MUTASI TAMBAH:	0,92		-	-	1.477.771.623,91
JUMLAH MUTASI KURANG:	1.477.771.623,91		-	-	
BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2024	1.429.596.077,27	1.144.049.681,79	-	-	-
SALDO AKHIR AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2024	17.560.351.850,09	24.150.977.869,36	-	357.562.400,00	1.481.771.623,00

Penjelasan Mutasi Tambah:

- Koreksi saldo Peralatan dan Mesin Tahun 2024 sebesar Rp. 0.92
- Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2024 sebesar Rp. 1,144,049,681.79
- Beban Penyusutan peralatan dan mesin Tahun 2024 sebesar Rp. 1.429.596.077,27
- Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2024 Rp. 1.477.771.623,91

Penjelasan Mutasi Kurang:

- Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya Tahun 2024 Rp. 1.477.771.623,91

Penjelasan mutasi tambah kurang diatas adalah per akun Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jln Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Perkiraan	2024	2023 (Audited)
-----------	------	----------------

7.	Aset Lainnya	1.497.251.623,91,-	4.000.000,-
----	--------------	--------------------	-------------



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tidak Bermanfaat milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dan 2023 .

1) Dasar Penilaian

- a. Neraca Awal 2005 Rp. -
- b. Harga Perolehan 2006 sd 2024 Rp. 15.480.000,-

Daftar Aset Lainnya Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

2. Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Lain-lain	4.000.000,-	1.493.251.623,91,-	-	1.497.251.623,91,-
Akm Peny Aset Lain-lain	4.000.000,-	1.477.771.623,91,-	-	1.481.771.623,91,-
Nilai Buku	0,00	15.480.000,-	-	15.480.000,-

Saldo Audited 2023 **4.000.000,-**

Mutasi Tambah **11.480.000,-**

Belanja Modal tahun 2024 0,00,-

Belanja Barang dan Jasa
dikapitalisir tahun 2024 0,00,-

Reklas dari Peralatan dan Mesin 1.493.251.623,91,-

Reklas dari Gedung dan
Bangunan ,-

Mutasi Kurang ,-

Penghapusan ,-

Saldo per 31 Des 2024 **1.493.251.623,91**



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

Penjelasan Mutasi Tambah

- Reklas dari peralatan dan mesin ke aset tidak bermanfaat (aset rusak berat/using) sebesar Rp 1.493.251.623,91,- dan penyusutan sebesar Rp 1.477.771.623,91 dengan nilai buku aset lainnya sebesar Rp 15.480.000

Penjelasan Mutasi Kurang

- Tidak ada mutasi kurang untuk aset tetap lainnya pada tahun 2024

Perkiraan	2024	2023 (Audited)
-----------	------	----------------

8. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 1.481.771.623,91,- 4.000.000,-

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dan 2023 .

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akm Peny Aset Lain-lain	4.000.000,-	1.477.771.623,91, -		1.481.771.623,91,-

Saldo Audited 2023	4.000.000,-,-
<u>Mutasi Tambah</u>	11.480.000,-
Reklas dari Peralatan dan Mesin	1.481.771.623,91,-
Reklas dari Gedung dan Bangunan	
<u>Mutasi Kurang</u>	
Penghapusan	
Saldo per 31 Des 2024	1.481.771.623,91,-



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

Penjelasan Mutasi Tambah

- Reklas dari peralatan dan mesin ke aset tidak bermanfaat (aset rusak berat/using) sebesar Rp 1.493.251.623,91,- dan penyusutan sebesar Rp 1.477.771.623,91 dengan nilai buku aset lainnya sebesar Rp 15.480.000

Penjelasan Mutasi Kurang

- Tidak ada mutasi kurang untuk aset tetap lainnya pada tahun 2024

5.2.2. KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Perkiraan	202	2023 (Audited)
-----------	-----	----------------

1. Utang Belanja Rp. 926.258.282,- Rp. 37.500.322,-

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Belanja yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada Pemberi Jasa dan PNS per 31 Desember 2024 dan 2023 . Utang belanja ini terdiri dari Utang belanja pegawai dan utang belanja barang dan jasa. Untuk tahun 2023, terdapat hutang belanja barang dan jasa yang merupakan hutang air, listrik telepon dan internet pada bulan desember 2023 yang dibayarkan pada januari tahun 2024. Utang belanja barang dan jasa dan hutang belanja pegawai sebesar **Rp. 926.258.282,-**. Penjelasan utang belanja dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Utang belanja Rp. 926.258.282,-

Yaitu utang belanja air, listrik, telepon dan internet yang merupakan pemakaian bulan Desember 2024 yang dibayarkan bulan Januari 2025, hutang belanja pemeliharaan, hutang modal gedung dan bangunan serta hutang belanja pegawai berupa Tambahan Penghasilan Pegawai pada bulan desember 2024 yang belum dibayarkan, dengan rincian sebagai berikut :



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Utang Belanja Pegawai	-	677.191.740,-	-	677.191.740,-
Utang Belanja Barang Jasa	37.500.322,-	122.775.162,-	37.500.322,-	122.775.162,-
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	126.291.380,-	-	126.291.380,-

- Penambahan sebesar Rp 122.775.162, terdiri dari Rp. 94.815.162,- adalah pengakuan hutang air, listrik, telepon dan internet tahun 2024 yang akan dibayarkan pada tahun 2025 dan Rp 27.960.000 adalah pengakuan utang belanja pemeliharaan di UPTD PSKW Andam Dewi yang belum dibayarkan.
- Penambahan sebesar Rp. 677.191.740,- adalah pengakuan hutang belanja pegawai berupa Tambahan Penghasilan Pegawai pada bulan Desember 2024 yang belum dibayarkan.
- Penambahan sebesar Rp. 126.291.380,- adalah pengakuan hutang belanja modal gedung dan bangunan di UPTD PSKW Andam Dewi yang belum dibayarkan.
- Pengurangan sebesar Rp. 37.500.322,- adalah hutang air tahun lalu yang telah dibayarkan pada awal tahun 2024.

Selengkapnya rincian utang belanja ini dapat lihat pada Lampiran 13

5.2.3. EKUITAS

Perkiraan	2024	2023 (Audited)
-----------	------	----------------

2. Ekuitas **Rp. 61.079.209.256,78,-** **Rp. Rp. 57.756.389.577,10,-**

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 dan 2023. Ekuitas ini terdiri dari:

- Ekuitas : 57.755.513.095,18



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

- Surplus/Defisit LO : (106.564.281.463,40)
- RK/PPKD : 109.881.849.925,00
- Jumlah Ekuitas : **61.073.081.556,78**

Secara lengkap perubahan Ekuitas dilaporkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Surplus/Defisit LO adalah selisih antara pendapatan LO dengan Beban LO yang dijelaskan pada penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional. Koreksi ekuitas dan RK/PPKD adalah rekening penghubung antara SKPD dengan PPKD yang akan dieliminasi saat menyusun Laporan Konsolidasi.

5.3. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

5.3.1 PENDAPATAN LO

5.3.2 BEBAN

Beban Operasi

Perkiraan	2024	2023 (Audited)
-----------	------	----------------

- a. **Beban Pegawai** **21.883.284.888,-** **21.525.106.759,-**

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pegawai per 31 Desember 2024 dan 2023. Beban Pegawai ini terdiri dari Beban Gaji dan Tunjangan ASN – LO, Beban Tambahan Penghasilan ASN – LO dan Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN - LO yaitu :

Uraian	2024	2023 (Audited)
Beban Pegawai		
• Beban Gaji dan Tunjangan	11.896.550.400,-	11.709.074.206,-
• Beban Tamb. Penghasilan ASN	9.185.134.488,-	9.242.152.553,-
• Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan	801.600.000,-	573.880.000,-



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

objektif lainnya ANS		
Jumlah	21.883.284.888,-	21.525.106.759,-

Adapun perbedaan jumlah Belanja Pegawai- LRA dengan beban pegawai-LO dapat dijelaskan sbb:

Objek Belanja LRA/LO	Belanja Pegawai LRA	Beban Pegawai LO	Selisih +/-
• Gaji dan tunjangan	11.873.797.223,-	11.896.550.400,-	22.753.177,-
• Tambahan Penghasilan PNS	8.530.695.925,-	9.185.134.488,-	654.438.563,-
• Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya PNS	801.600.000,-	801.600.000,-	
Jumlah	21.206.093.148,-	21.883.284.888,-	677.191.740,-

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Belanja Pegawai - LO		-	677.191.740,-		677.191.740,-	-
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS		-	22.753.177,-		22.753.177,-	-
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS			552.467.190,-		552.467.190,-	
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS			101.971.373,-		101.971.373,-	



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

Perkiraan	2024	2023 (Audited)
-----------	------	----------------

b. **Beban Barang & Jasa** **41.610.487.366,34-** **43.092.070.728,66,-**

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023. Beban Barang dan Jasa ini terdiri dari beban barang dan Jasa-LO dapat dijelaskan sbb:

Objek Beban LO	Beban Brg&Jasa LO
• Beban Barang	18.276.010.221,00
• Beban Jasa	15.934.254.399,34
• Beban Pemeliharaan	484.501.837,00
• Beban Perjalanan Dinas	4.723.098.659,00
• Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.192.622.250,00
Jumlah	41.610.487.366,34

Saldo / jumlah beban barang dan jasa tersebut diatas adalah jumlah netto.

Adapun perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa- LRA dengan beban barang dan Jasa-LO dapat dijelaskan sbb:

Objek Belanja LRA/LO	Belanja Brg & Jasa LRA	Beban Brg & Jasa LO	Selisih +/-
• Beban Barang	18.345.749.033,00	18.276.010.221,00	69.738.812,00
• Beban Jasa	16.399.407.524,00	15.934.254.399,34	465.153.124,66
• Beban Pemeliharaan	749.201.996,00	484.501.837,00	264.700.159,00
• Beban Perjalanan Dinas	4.723.098.659,00	4.723.098.659,00	0,00
• Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak	2.192.622.250,00	2.192.622.250,00	0,00



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

Lain/Masyarakat			
Jumlah	42.410.079.462,00	41.610.487.366,34	799.592.095,66

Penjelasan selisih:

a) Penyesuaian terkait persediaan

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smstr 1		Penyesuaian Smstr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Beban Barang	177.625.641,00	222.000,00	133.202.950,00	55.748.386,00	320.277.785,00	55.970.386,00

b) Penyesuaian terkait beban di bayar dimuka

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smstr 1		Penyesuaian Smstr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Beban Jasa	22.432.516,00	17.363.366,67	19.918.414,00	23.560.565,67	42.350.930,00	40.923.932,34

c) Penyesuaian terkait kapitaslisasi aset

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smstr 1		Penyesuaian Smstr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Beban Jasa	0,00	144.927.861,00	0,00	433.536.460,00	0,00	578.464.321,00
Beban Pemeliharaan	0,00	50.000.000,00	0,00	126.935.000,00	0,00	176.935.000,00

d) Penyesuaian terkait belanja modal tidak dikapitalisir

Objek Belanja	Penyesuaian Smstr 1	Penyesuaian Smstr 2	Jumlah
---------------	---------------------	---------------------	--------



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

LRA/LO	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Beban Barang	19.050.000,00	0,00	236.769.393,00	0,00	255.819.393,00	0,00

e) Penyesuaian terkait utang belanja barang dan jasa

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smstr 1		Penyesuaian Smstr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Beban Jasa	38.792.553,00	1.292.231,00	0,00	122.775.162,00	38.792.553,00	124.067.393,00

Perkiraan	2024	2023(Audited)
-----------	------	---------------

c. **Beban Hibah** **Rp 40.496.863.450,-** **Rp 37.430.037.166,-**

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Hibah Tahun 2023 dan 2022. Beban Hibah ini terdiri dari beban hibah-LO dapat dijelaskan sbb:

Objek Beban LO	Beban Hibah LO
• Beban Hibah Uang	Rp 40.496.863.450

Saldo / jumlah beban Hibah tersebut diatas adalah jumlah netto.

Adapun perbedaan jumlah Belanja Hibah- LRA dengan beban Hibah-LO dapat dijelaskan sbb:

Objek Belanja LRA/LO	Belanja Hibah LRA	Beban Hibah LO	Selisih +/-
• Beban Hibah	Rp 40.496.863.450	Rp 40.496.863.450	-



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

Perkiraan	2024	2023(Audited)
-----------	------	---------------

d. **Beban Bantuan Sosial** **0,00,-** **0,00,-**

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023. untuk anggaran tahun 2024 tidak ada beban bantuan sosial.

Objek Beban LO	Beban Bantuan Sosial LO
• Beban Bantuan Sosial	-

Saldo / jumlah Beban Bantual Sosial tersebut diatas adalah jumlah netto.

Perkiraan	2024	2023 (Audited)
-----------	------	----------------

e. **Beban Penyusutan dan Amortisasi** **Rp 2.573.645.759,06** **Rp 2.707.646.371,56,-**

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyusutan Tahun 2024. Beban Penyusutan dan Amortisasi ini terdiri dari :

- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 1.429.596.007,27,-
- Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 1.144.049.681,79,-
- Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya 0,00,

Beban Penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya serta beban amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing kelompok Aset dihitung berdasarkan Peraturan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 serta Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

Selengkapnya beban penyusutan per kode barang, dapat dilihat pada KIB B,C,D,E daftar inventaris SKPD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Rekapitulasi Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutannya dapat dilihat pada Lampiran 17.

5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Perkiraan		2024	2023
1	Ekuitas awal	57.756.389.577,10	52.968.442.500,68
3	Surplus/Defisit LO	(106.564.281.463,40)	(104.754.861.025,22)
4	RK PPKD	109.881.849.925,00	109.574.482.732,00
5	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	-	-
6	Koreksi Nilai Persediaan	-	-
7	Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-
8	Lain-lain	(876.481,92)	(31.674.630,36)
9	Ekuitas Akhir	61.073.081.556,78	57.756.389.577,10

Penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Ekuitas Awal sebesar Rp. 57.756.389.577,10 adalah saldo Ekuitas akhir tahun 2023 berdasarkan Neraca Audited per 31 Des 2023.
2. Surplus/Defisit LO sebesar Rp (106.564.281.463,40,-) adalah selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO Tahun 2024.



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

3. RK PPKD sebesar Rp. 109.881.849.925,- adalah akun penghubung transaksi SKPD dan PPKD Tahun 2024 yang akan dieliminasi saat disusun Laporan Konsolidasi.
4. Koreksi ekuitas Lain-lain sebesar Rp. (876.481,92)
5. Ekuitas Akhir tahun 2024 sebesar Rp. 61.073.081.556,78,- adalah saldo Ekuitas Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024.

5.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai tahun 2015 ini, maka terdapat akun-akun baru pada Neraca sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja yaitu :

1. Beban Dibayar Dimuka
2. Utang Belanja

Sedangkan pada Laporan Operasional :

1. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas dengan Laporan Operasional (LO) dengan basis akrual , dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Jenis Pendapatan/ Belanja	LRA	LO	Selisih
Belanja Operasi			
• Belanja Pegawai	21.206.093.148,00	21.883.284.888,00	677.191.740,00
• Belanja Brg & Jasa	42.410.079.462,00	41.610.487.366,34	799.592.095,66
• Belanja hibah	40.496.863.450,00	40.496.863.450,00	-



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

• Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
• Belanja Modal	5.772.913.865,00	-	5.772.913.865,00
• Beban Penyusutan & Amortisasi	-	2.573.645.759,06	(2.573.645.759,06)
Jumlah Beban Operasi	104.113.036.060,00	103.990.635.704,34	122.400.355,66

Penjelasan selisih antara LRA dan LO sudah dijelaskan pada penjelasan Laporan Operasional (LO) dan rekapitulasinya dapat dilihat pada Lampiran 27.



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 dan telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat dinyatakan pada pasal 11 (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah dibidang urusan sosial. Pada pasal 12 Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial dan tugas pembantuan. Dalam kewenangan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pelayanan kesejahteraan sosial pada Dinas Sosial diwujudkan dalam tugas pokok dan fungsi..

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang sosial;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang sosial;
- d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - a. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6.2 Struktur Organisasi

a. Susunan Organisasi

Mengacu pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Sosial memiliki susunan organisasi yang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga Dinas, ketatausahaan, ketatalaksanaan, humas, protokol, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat. Sekretariat membawahi :

- a) Sub Bagian Program dan Data;
- b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- c) Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Perlindungan dan Jaminan Sosial. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi :

- a) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
- b) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial; dan
- c) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga.

d. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Rehabilitasi Sosial. Bidang Rehabilitasi Sosial membawahi :

- a) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
- b) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
- c) Seksi Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Napza, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

e. Bidang Pemberdayaan Sosial;

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai Tugas menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Pemberdayaan Sosial. Bidang Pemberdayaan Sosial membawahi :



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

- a) Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, Kelembagaan dan Komunitas Adat Terpencil;
- b) Seksi Penyuluhan Sosial dan Pengelolaan Dana Sosial; dan
- c) Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.

f. Bidang Penanganan Fakir Miskin;

Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Penanganan Fakir Miskin. Bidang Penanganan Fakir Miskin membawahi :

- a) Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan;
- b) Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan; dan
- c) Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Kepulauan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

UPTD merupakan organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas. Kegiatan teknis operasional yang dimaksud adalah kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya yaitu Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. UPTD melaksanakan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial melalui sistem panti. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, maka dibentuk UPTD yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas Sosial, yaitu :

- a) UPTD Panti Sosial Bina Netra "Tuah Sakato" Padang;
- b) UPTD Panti Sosial Bina Grahita "Harapan Ibu" Padang;
- c) UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja "Budi Utama" Lubuk Alung;
- d) UPTD Panti Sosial Asuhan Anak "Tri Murni" Padang Panjang;
- e) UPTD Panti Sosial Bina Remaja "Harapan" Padang Panjang;



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

- f) UPTD Panti Sosial Tresna Werdha “Sabai Nan Aluih” Sicincin;
- g) UPTD Panti Sosial Tresna Werdha “Kasih Sayang Ibu” Batusangkar; dan
- h) UPTD Panti Sosial Karya Wanita “Andam Dewi” Solok.

Sesuai dengan tugas pokok, fungsi, tujuan dan sasaran, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan komprehensif. Penerapan pendekatan ini dengan perspektif masalah kesejahteraan sosial dan cara penanganannya. Pada dasarnya permasalahan sosial tidak berdiri sendiri atau ada hubungan atau kausalitas yang dinamis. Oleh karena itu struktur organisasi dan tugas-tugas pokok pada masing-masing bagian tersebut di atas mendeskripsikan saling keterkaitan dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial serta pemberian pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Fungsi perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial serta pelayanan dan rehabilitasi sosial merupakan langkah awal yang akan ditindaklanjuti oleh bagian teknis operasional. Pada bagian teknis operasional prinsip-prinsip teknis developmental, partisipatif dan preventif yang diimban oleh bagian Pemberdayaan Sosial merupakan upaya pengembangan dan peningkatan modal sosial. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya masyarakat mengalami hambatan-hambatan sehingga potensi dan modal sosial masyarakat tidak berperan optimal. Maka fungsi pelayanan dan rehabilitasi sosial serta bantuan dan jaminan sosial memberikan layanan kepada masyarakat atas dasar prinsip praktek teknis, kuratif, rehabilitatif dan asistensi.

Dengan pola pelaksanaan tugas sebagaimana diuraikan di atas, ditetapkan metode pendekatan komprehensif integratif atau holistik. Artinya, cara pandang dan penanganan masalah kesejahteraan sosial tidak parsial. Dengan demikian sinergitas organisasi pada Dinas Sosial sangat perlu dan telah berjalan sejak lama. Sinergitas ini pula diperlukan oleh atas lembaga pelaksana layanan kesejahteraan sosial tingkat Kabupaten/Kota.

Adapun jumlah Pegawai Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2024 berjumlah **158 orang**, dengan susunan sebagai berikut :



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

TABEL 6.1

JUMLAH PEGAWAI PER UNIT KERJA DAN UPTD

NO	UNIT KERJA	JUMLAH
1	Kepala Dinas	1 Orang
2	Sekretariat	20 Orang
3	Bidang Pemberdayaan Sosial	11 Orang
4	Bidang Penanganan Fakir Miskin	9 Orang
5	Bidang Rehabilitasi Sosial	11 Orang
6	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	11 Orang
7	UPTD PSBG Harapan Ibu Padang	10 Orang
8	UPTD PSBN Tuah Sakato Padang	17 Orang
9	UPTD PSSABR Budi Utama Lubuk Alung	16 Orang
10	UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin	12 Orang
11	UPTD PSKW Andam Dewi Sukarami Solok	9 Orang
12	UPTD PSTW Kasih Sayang Ibu Batusangkar	11 Orang
13	UPTD PSBR Harapan Padang Panjang	10 Orang
14	UPTD PSAA Tri Murni Padang Panjang	10 Orang
JUMLAH		158 Orang

Tabel di atas dapat disajikan dalam diagram berikut :

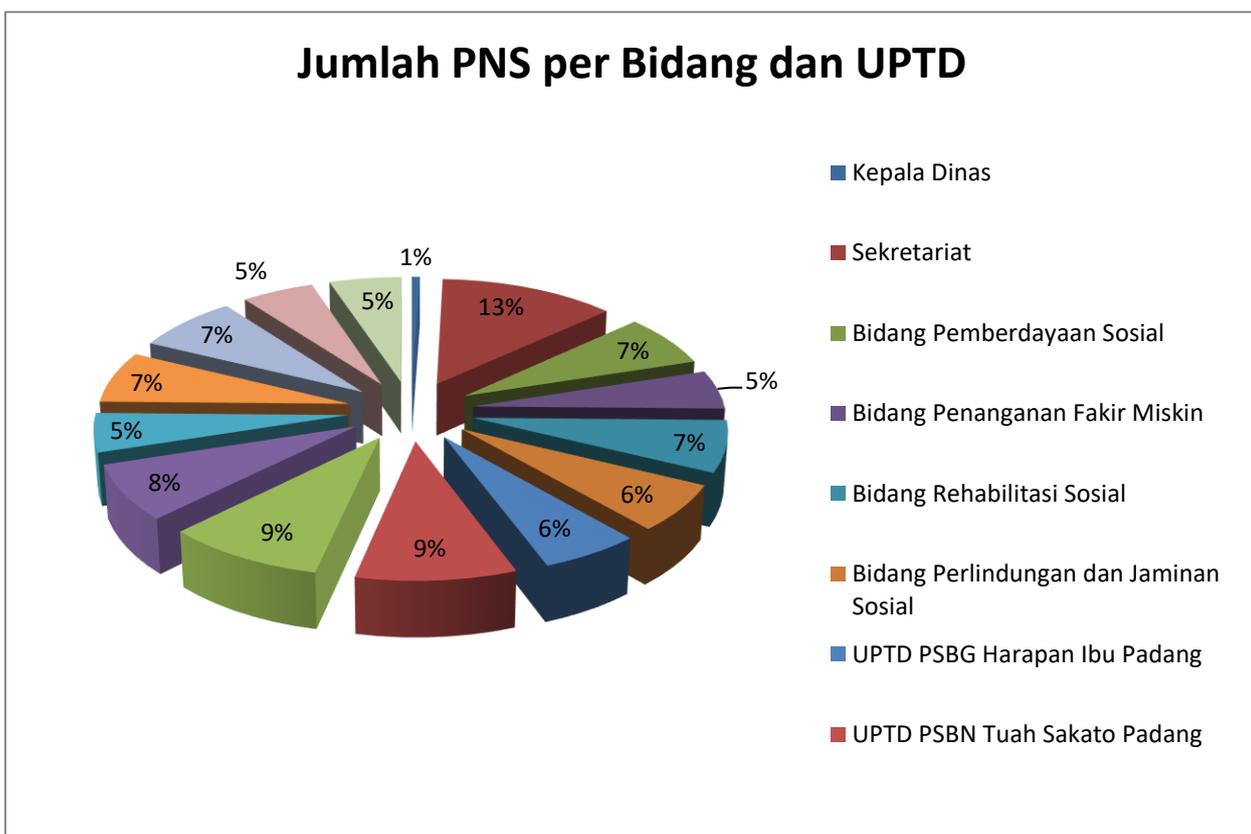


LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

DIAGRAM 6.1

PERSENTASE JUMLAH PEGAWAI PER BIDANG DAN UPTD



a. Jumlah Pegawai berdasarkan pangkat/golongan :

TABEL 6.2

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN

No	Golongan	Jumlah
1	I/a	-
2	I/b	-
3	I/c	-
4	I/d	1 orang
5	II/a	4 orang
6	II/b	10 orang



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

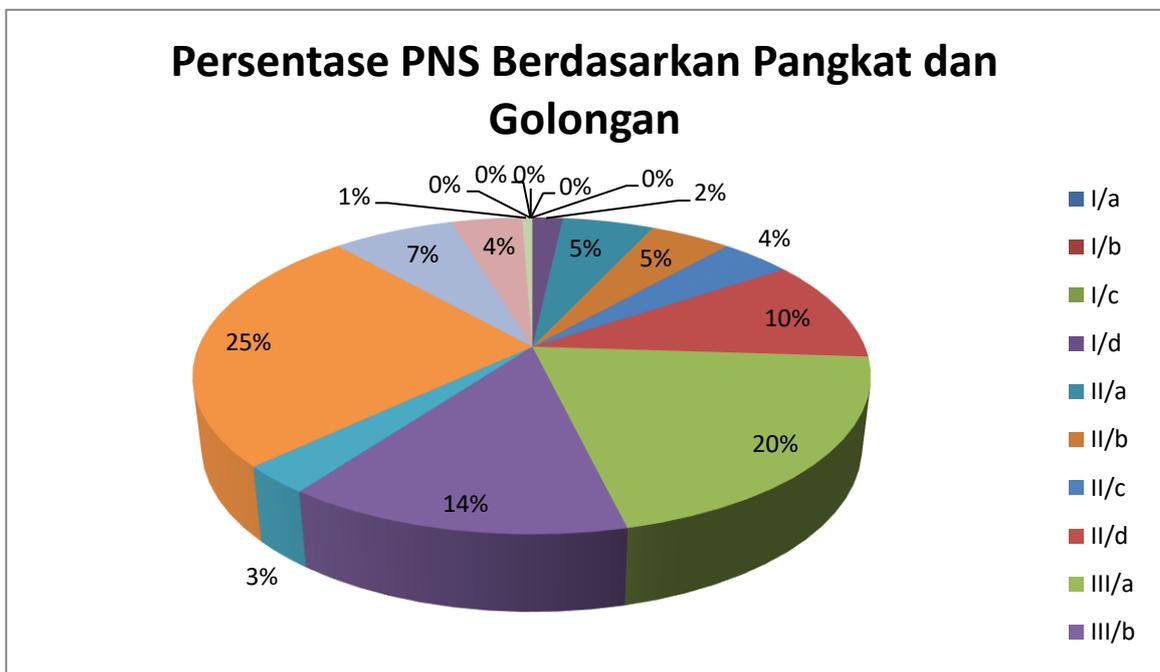
AKRUAL

7	II/c	8 orang
8	II/d	15 orang
9	III/a	30 orang
10	III/b	25 orang
11	III/c	6 orang
12	III/d	36 orang
13	IV/a	16 orang
14	IV/b	6 orang
15	IV/c	1 orang
16	IV/d	-
17	IV/e	-
	Jumlah	158 orang

Tabel di atas dapat juga disajikan dalam diagram berikut :

DIAGRAM 6.2

PERSENTASE PNS BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN





LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

b. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

TABEL 6.3
JUMLAH PEGAWAI PADA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT
MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD	0 orang
2	SLTP	2 orang
3	SMA	45 orang
4	D1- DIII	4 orang
5	DIV/S1	88 orang
6	S2	19 orang
7	S3	0 orang
Jumlah		158 orang

Tabel di atas dapat juga disajikan dalam diagram berikut :

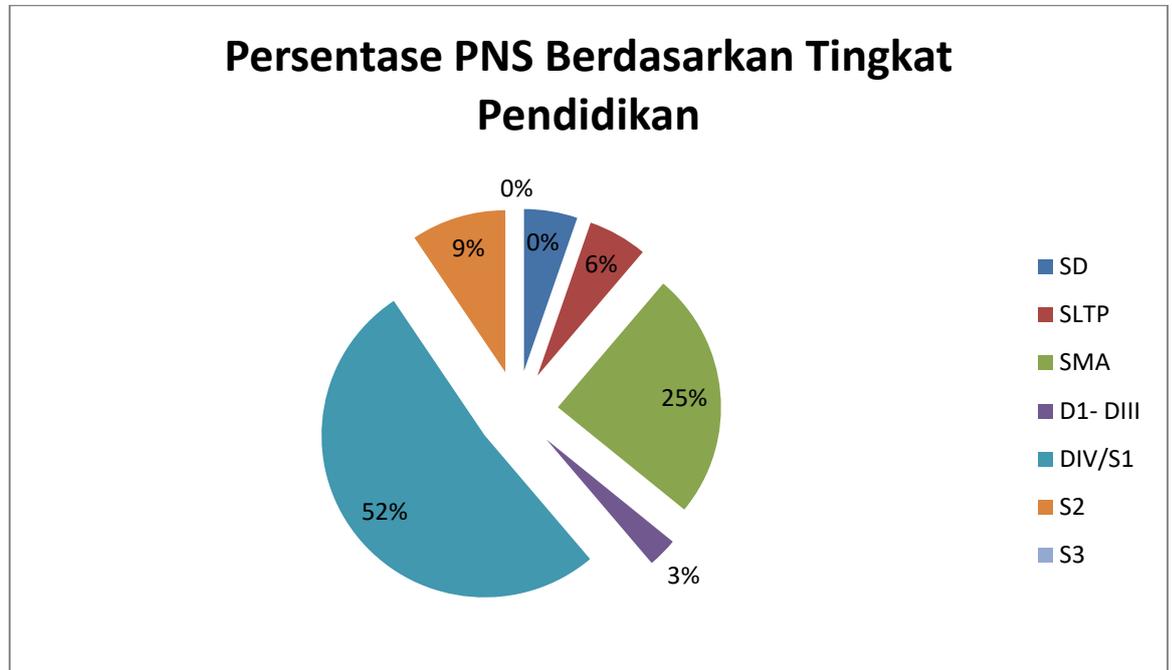


LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

DIAGRAM 6.3

PERSENTASE PNS BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN



6.3 Aspek Strategis Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

Sebagai SKPD Teknis pada Pemerintah Daerah, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat memiliki tugas yang cukup berat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat Sumatera Barat.

Daerah Sumatera Barat merupakan daerah yang sangat rawan bencana seperti longsor, banjir, gempa dan lain sebagainya, sehingga mengakibatkan masyarakatnya terkena musibah/masalah. Salah satunya menyebabkan kehilangan pekerjaan, tempat tinggal dan lain-lain sebagainya yang dapat menyebabkan juga tingkat perekonomiannya menjadi terganggu.

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat merupakan lembaga pemerintah yang menangani permasalahan sosial di Sumatera Barat mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam rangka meningkatkan fungsi sosialnya secara wajar sehingga kesejahteraan sosialnya meningkat.

Situasi dan kondisi yang terdiri dari sejumlah faktor yang berpotensi menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya dapat



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

disebut sebagai kekuatan penghambat. Sekalipun demikian Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat juga memiliki faktor positif yang dapat diidentifikasi sebagai kekuatan pendorong peningkatan kinerja masyarakat. Untuk mendukung analisis selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 6.4 yang mengidentifikasi beberapa aspek strategis sebagai faktor pendorong dan faktor penghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

TABEL 6.4

FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT

FAKTOR INTERNAL	
<p>Kekuatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya peraturan dan perundang-undangan. 2. Adanya Aparatur /Sumber Daya Manusia 3. Adanya sarana dan prasarana yang tersedia 4. Adanya dana. 	<p>Kelemahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan dan perundang-undangan yang mendukung perlu disempurnakan. 2. SDM aparatur masih belum profesional dan optimal 3. Sarana dan prasarana yang tersedia belum memadai untuk mendukung kelancaran tugas. 4. Belum jelasnya sistem pembinaan karir aparatur.
FAKTOR EKSTERNAL	
<p>Peluang :</p> <p>Meningkatnya peran serta masyarakat dan lembaga kesejahteraan sosial dalam upaya pembinaan masyarakat dilokasinya dalam meningkatkan fungsi sosialnya / kesejahteraan sosialnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berperannya Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Adat dalam 	<p>Ancaman :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pendidikan dan pelatihan teknis kepada masyarakat untuk membangun dalam rangka meningkatkan fungsi sosialnya. 2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan kemampuan dalam menangani



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

<p>membantu penanganan berbagai permasalahan sosial masyarakat ditengah kehidupan masyarakat, dalam mewujudkan kerukunan dan kedamaian hidup bermasyarakat.</p>	<p>permasalahannya, 3. Masih signifikannya kesenjangan pendapatan antar masyarakat di daerah (seperti di daerah perkotaan, pedesaan dll) sehingga berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial</p>
---	---



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

BAB VII PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Pada tahun 2024 Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dialokasikan **6 Program, 18 Kegiatan, 76 Sub Kegiatan** dengan target capaian kinerja telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Dari Jumlah Dana **Rp. 114.247.707.631,-**, terealisasi sebesar **Rp. 109.885.949.925,- (96,18%)**, yang terdiri dari :

1. **Belanja Operasi** sebesar **Rp. 108.311.836.642,-** dan telah terealisasi sebesar **Rp. 104.113.036.060,- (96,12%)**.
2. **Belanja Modal** sebesar **Rp. 5.935.870.989,-** terealisasi sebesar **Rp. 5.772.913.865,- (97,25%)**.

Secara total dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala, sehingga target capaian kinerja tidak tercapai 100 % seperti yang diharapkan. Adapun Kegiatan yang realisasi keuangannya dibawah **90 %** dan **70 %** dengan kegiatannya sebagai berikut:

1. Kegiatan yang tidak terlaksana realisasi dibawah 70 % sebagai berikut:

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	KETERANGAN
1.06.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	47.343.000	15.584.000	32.92%	Pembayaran Biaya Notaris terhadap pembuatan balik nama Sertifikat Tanah Dinas Sosial Provinsi tidak jadi digunakan
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.500.000	2.000.000	10.81%	Tidak adanya publikasi dan Dialog Interaktif pada Dinas Sosial
1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang	19.950.000	-	0.00%	Tidak tersalurkannya bantuan di karenakan anak dalam panti yang akan disalurkan



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

					tidak ada
1.06.04.1.01.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	164.335.500	107.287.200	65.29%	Sisa perjalanan dinas dan sewa yang tidak jadi dilaksanakan
1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan	24.000.000	9.000.000	37.50%	Tidak ada klien yang meninggal dunia di dalam panti
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.108.500	16.379.125	67.94%	Pembelian UPS tidak jadi dilaksanakan karena tidak sesuai spesifikasi

2. Kegiatan yang realisasi keuangannya dibawah 90% kegiatannya sebagai berikut:

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	KETERANGAN
1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	114.605.500	98.997.900	86.38%	Sisa anggaran yang tidak terpakai lagi
1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	101.145.900	87.299.980	86.31%	Sisa anggaran yang tidak terpakai lagi
1.06.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	42.790.000	36.140.000	84.46%	Sisa anggaran yang tidak terpakai lagi
1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	33.915.100	29.015.600	85.55%	Sisa anggaran yang tidak terpakai lagi



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.758.000	20.758.000	87.37%	Sisa anggaran yang tidak terpakai lagi
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.360.000	17.040.915	83.70%	Sisa anggaran yang tidak terpakai lagi
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.594.100	16.301.100	87.67%	Sisa anggaran yang tidak terpakai lagi
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.210.000	2.565.000	79.91%	Sisa anggaran yang tidak terpakai lagi
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.550.000	37.600.000	80.77%	Sisa anggaran yang tidak terpakai lagi
1.06.01.1.09.0011	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.805.170	48.097.000	86.19%	Sisa anggaran yang tidak terpakai lagi
1.06.04.1.02.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1.017.378.294	881.746.675	86.67%	Sisa anggaran yang tidak terpakai lagi
1.06.04.1.03.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	198.395.700	171.277.300	86.33%	Sisa anggaran yang tidak terpakai lagi



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

1.06.04.1.04.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	57.016.100	49.241.000	86.36%	Sisa anggaran yang tidak terpakai lagi
1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	258.626.500	182.661.810	70.63%	Sisa anggaran yang tidak terpakai lagi
1.06.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	3.260.000	2.550.000	78.22%	Sisa anggaran yang tidak terpakai lagi
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.867.000	85.462.230	80.73%	Sisa anggaran yang tidak terpakai lagi
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.250.000	14.452.800	88.94%	Sisa anggaran yang tidak terpakai lagi
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.680.000	8.681.000	89.68%	Sisa anggaran yang tidak terpakai lagi
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	157.657.200	116.015.129	73.59%	Sisa anggaran yang tidak terpakai lagi
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	425.224.000	375.117.436	88.22%	Sisa anggaran yang tidak terpakai lagi



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.150.000	49.104.970	73.13%	Sisa anggaran yang tidak terpakai lagi
1.06.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	3.474.000	2.754.000	79.27%	Sisa anggaran yang tidak terpakai lagi
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	86.767.375	62.017.420	71.48%	Sisa anggaran yang tidak terpakai lagi
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	86.767.375	62.017.420	71.48%	Sisa anggaran yang tidak terpakai lagi
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.750.000	27.487.750	83.93%	Sisa anggaran yang tidak terpakai lagi
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.200.000	900.000	75.00%	Sisa anggaran yang tidak terpakai lagi
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53.143.850	38.887.980	73.17%	Sisa anggaran yang tidak terpakai lagi



LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL 2024

AKRUAL

7.2 Saran

1. Perlunya perencanaan anggaran yang lebih baik di dalam Penyusunan Anggaran, sehingga dalam penggunaan dana dapat lebih optimal sesuai dengan dana yang tersedia dan rencana pelaksanaan.
2. Perlunya ditingkatkan Bimbingan Teknis tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan pengadaan Barang dan Jasa terhadap pengelola keuangan dan Pejabat Pengadaan, sehingga permasalahan dalam proses pengadaan dapat berjalan dengan lancar.
3. Perlu penambahan tenaga akuntansi, karena terbatasnya tenaga tersebut sehingga penyusunan laporan keuangan berbasis akrual sedikit mengalami hambatan.

Demikian laporan keuangan ini dibuat semoga bermanfaat dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual di tingkat Provinsi, dan bermanfaat bagi kita semua terutama dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial di Sumatera Barat.